

**STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
MENGUNAKAN HAK PILIH PADA PEMILIHAN UMUM 2019  
DI KABUPATEN NGANJUK**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Misna Muzdalifa R.**  
**NIM. 302180096**

Pembimbing:

**Dr. H. Ahmad Munir, M. Ag.**  
**NIP. 1968061998031002**

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Rahmawati, Misna Muzdalifa. 2022.** *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Nganjuk Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Nganjuk.* **Skripsi.** Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Ahmad Munir, M. Ag.

**Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Partisipasi Politik.**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk melakukan sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU selama ini masih belum membuat masyarakat memahami siapa yang dipilih dan apa pentingnya menggunakan hak pilih. Mengingat masih banyak masyarakat yang mengesampingkan pemilihan umum, karena dianggap kurang begitu penting bagi mereka. Untuk itu diperlukan Strategi Komunikasi yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini untuk mengetahui Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum(KPU), faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan prosedur pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman dilakukan dengan interaktif juga berlangsung terus menerus meliputi: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini adalah strategi yang digunakan KPU Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan kegiatan tatap muka secara langsung, melakukan kegiatan yang menarik perhatian masyarakat, memberikan informasi melalui berbagai media, menggunakan relawan demokrasi untuk mengajak berbagai segmen masyarakat. Faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat adalah kesadaran masyarakat terhadap pemilu, sosialisasi dan pendidikan pemilih, peran peserta pemilu dan terakhir peran pemerintah daerah dan stakeholder. Kemudian hambatan peningkatan masyarakat ialah kendala administrasi, waktu, kurangnya SDM segmen internet, pemilihan hari pemilu, kurangnya koordinasi antar petugas KPU dengan KPPS.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Misna Muzdalifa R.  
NIM : 302180096  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Judul : “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu)  
Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam  
Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum 2019 Di  
Kabupaten Nganjuk”

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 13 Maret 2022

**Mengetahui**

**Menyetujui**

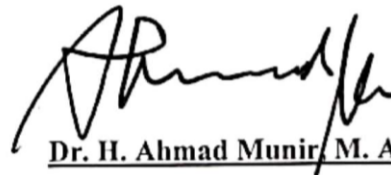
**Ketua Jurusan**

**Pembimbing**



**Kavvis Fithri Ajhuri, M.A**

**NIP. 198306072015031004**



**Dr. H. Ahmad Munir, M. Ag.**

**NIP. 1968061998031002**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

**PENGESAHAN**

Nama : Misna Muzdalifa R.  
NIM : 302180096  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Judul : Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum 2019 Di Kabupaten Nganjuk.


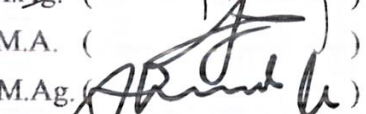
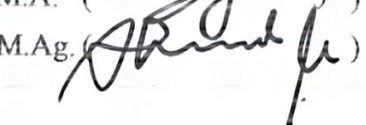
Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 13 April 2022

Dan telah diterima oleh tim penguji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Komunikasi dan Penyiaran Islam (S.Sos) pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 21 April 2022

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. M. Irfan Riyadi, M.Ag. (  )
2. Penguji 1 : Kayyis Fithri Ajhuri, M.A. (  )
3. Penguji 2 : Dr. H Ahmad Munir, M.Ag. (  )

Ponorogo, 21 April 2022

Mengesahkan

Dekan



  
**Dr. H. Ahmad Munir, M.Ag.**

NIP.196806161998031002

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misna Muzdalifa R.

NIM : 302180096

Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Judul : Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum 2019 Di Kabupaten Nganjuk

Menyatakan bahwa naskah tulisan skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 18 Mei 2022



Misna Muzdalifa R.  
302180096



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat: Jl. Puspita Jaya Desa Pintu, Jenangan, Ponorogo 63492

e-mail: [fuad@iainponorogo.ac.id](mailto:fuad@iainponorogo.ac.id), website:

<http://fuad.iainponorogo.ac.id>

---

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misna Muzdalifa R

NIM : 302180096

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) UNTUK  
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
MENGUNAKAN HAK PILIH PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DI  
KABUPATEN NGANJUK”

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 13 Maret 2022

Pembuat Pernyataan



Misna Muzdalifa R.  
302180096

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan informasi yang kian banyak jenisnya tak membuat penyebaran informasi dengan mudah diterima oleh masyarakat. Masyarakat dibekali akal pikiran dan panca indera sebagai alat untuk mencari jalan keluar agar nantinya bisa terarah dan memilah mana yang benar dan salah. Berkomunikasi dengan orang lain seperti orang tua, saudara, tetangga, teman sekolah, rekan kerja, dan lain sebagainya. Pada unit terkecil dengan lingkungannya. Komunikasi begitu penting, mengingat manusia adalah makhluk sosial, yang artinya membutuhkan satu sama lain. Berkomunikasi merupakan inti dari hubungan sosial yang dapat mengantarkan manusia pada tujuan-tujuan dan mencapai kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Komunikasi selalu berhubungan dengan orang lain, dalam berbagai konteks atau bidang komunikasi. kegiatan komunikasi tidak sekadar menyampaikan pesan informasi tetapi juga mengandung unsur persuasif agar orang lain bersedia menerima suatu pemahaman serta melakukan anjuran, perintah, rayuan dan sebagainya. Komunikasi jika tidak tersampaikan dengan baik, maka akan membuat suatu kelompok atau organisasi kegiatan hancur. Hal ini membuktikan komunikasi tidak dapat dilepaskan dalam kegiatan sesama manusia. Mengingat manusia selalu

---

<sup>1</sup> Yoyon Mudjiono, *Ilmu Komunikasi*(Surabaya: Jaudar Press,2015), 2.

berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lain agar tidak ada kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Demi tercapainya komunikasi yang efektif, perlu adanya strategi komunikasi yang efisien. Seperti halnya dalam strategi bisnis, pada umumnya untuk menentukan dan mengkomunikasikan visi dan misi suatu perusahaan melalui sistem dengan tujuan utama beserta kebijakan. Strategi memberi gambaran arah yang didukung oleh berbagai sumber daya yang telah ada. Selain itu, strategi juga sangat dibutuhkan dalam suatu Lembaga atau kelompok. Sehingga strategi komunikasi mempunyai pengertian, segala aktifitas yang akan dilakukan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan dengan tujuan tertentu sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Baik itu dengan media apa, bagaimana perumusannya serta efek apa yang nanti akan ditimbulkan.

Strategi pada intinya yakni tentang *planning* atau perencanaan dan bagaimana manajemen operasionalnya. Strategi komunikasi hendaknya mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan, nantinya akan digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat atau sasaran. Masyarakat akan memperoleh manfaat berdasarkan sudut pandang dan sasaran dapat dijangkau lebih luas serta efektif.

Masyarakat turut berperan besar dalam kekuasaan negara berdasarkan konsep demokrasi. Konsep demokrasi berdaulat dengan rakyat, maka partisipasi masyarakat dalam hak suara penentuan pemimpin menjadi tolok ukur demokrasi di negara tersebut dan mengukur bagaimana partisipasi



politik didalamnya. Seperti halnya partisipasi politik sendiri yakni, keikutsertaan baik individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan politik yang berdampak nyata dalam kehidupan mereka.<sup>1</sup> Partisipasi pemilih dalam politik pemilihan umum menjadi perhatian serius oleh penyelenggara dan pemerintah. Alasannya, salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilu ketika partisipasi pemilih tinggi menandakan bahwa penyelenggaraan pemilu dapat kepercayaan dari masyarakat. Dampak secara politis, kuatnya legitimasi pemerintah yang dihasilkan. Terselenggaranya pemilihan umum di Indonesia sebagai bukti nyata atas eksistensi demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pengertian Secara umum, Pemilihan Umum (PEMILU) adalah sebuah program Pemerintah sebagai sarana memilih calon pemimpin. PEMILU menjadi salah satu momen yang selalu dinanti oleh masyarakat dalam 5 tahun, karena pemilihan umum yang kita kenal sebagai PEMILU adalah pesta demokrasi rakyat untuk memilih calon pemimpin secara demokrasi. Dimana rakyat berhak memilih dan memberi suara pada satu calon pemimpin yang mereka yakini akan menjadi pemimpin yang baik. “Manusia itu berdaulat penuh atas dirinya, ia memiliki hak-hak yang lahir dari dan atas diri sendiri. Kedaulatan orang yang satu tidak kurang tetapi juga tidak lebih dari yang lain. Pada situasi yang seperti itu tidak akan mungkin ada kemajuan. Maka manusia itu serentak bersamasama menyerahkan kedaulatan masing-masing kepada masyarakat, lalu pelaksana

---

<sup>1</sup> Keith Faulks, *Sosiologi politik* (bandung: Penerbit Nusa Media,2012), 226

perintah-perintah ialah negara dan pemerintah. Penyerahan itu disertai dengan satu syarat: ia berhak turut serta untuk menyusun kemauan umum, *volonte generale*, yang akan dijadikan kemauan negara. Pemilu menurut Sodikin.<sup>2</sup>

Pasca reformasi pada tahun 2004 masyarakat Indonesia dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan kandidat partai politik yang akan menjadi wakil rakyat sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pemilihan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Penyelenggaraan yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersifat nasional dan tentunya berdasar UUD 1945.

Dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi, penyambung antara kedaulatan dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elite politik. Setiap warga negara yang dianggap dewasa dengan sudah memenuhi persyaratan menurut Undang-undang yang berlaku, nantinya dapat memilih wakil mereka untuk menduduki kursi parlemen. Untuk memastikan bahwa pemilihan itu mewakili pilihan rakyat dengan beberapa jaminan yang tercantum dalam undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan umum. menurut R William Luddle.<sup>3</sup> Dalam pasal 28 tentang hak memilih adalah

---

<sup>2</sup> Sodikin, *hukum Pemilu, Pemilu sebagai Praktik Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publisng, 2014), 12-13

<sup>3</sup> Toni Andrianus P, dkk. *Teori-teori politik: Dari Sistem Politik sampai Korupsi* (bandung: Penerbit NUANSA MEDIA, 2013), 298

warga negara yang pada waktu pemungutan suara untuk Pemilihan Umum sudah berumur 17(tujuh belas)tahun atau sudah kawin mempunyai hak pernyataan tentang pemilu. UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Namun pada tahun 2017 ada perubahan perundang-undangan tentang pemilihan umum. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lembaga penyelenggara pemilu menjadi KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu di Indonesia.

Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk berdasarakan Keputusan KPU Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mengerti dan sadar pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan diperlukan strategi komunikasi, kombinasi komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran, penerima sampai pengaruh atau efek yang disusun untuk tujuan komunikasi yang efektif. Sosialisasi dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan yang akan datang sangat dibutuhkan, agar masyarakat lebih memahami pentingnya menggunakan hak pilih.<sup>4</sup>

Pemilihan Umum tahun 2019 merupakan suatu momen pemilihan umum atau pemilu diadakan serentak pertama, di mana untuk pertama

---

<sup>4</sup> M. Choirullah P, dkk. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019*. POLITEA : Jurnal Politik Islam, Vol. 3 No. 2, 2020

kalinya masyarakat Indonesia diberikan kesempatan untuk memilih wakil rakyat dan presiden dalam waktu yang sama. Beberapa pihak menyatakan bahwa problematika pemilu serentak 2019 di Indonesia sebagai pemilu terkomples dan tersulit di dunia karena pemilihan anggota legislatif DPR/D dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Permasalahan teknis dilapangan yang dijumpai seperti ada terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat, kerumitan proses mencoblos pada bilik suara, 5 kotak suara harus diisi, kelemahan penyelenggara, DPT, permasalahan administrasi, hoaks yang tersebar, selain itu tak sedikit penyelenggara pemilihan umum meninggal dunia ketika proses pemilu 2019, diduga akibat kelelahan. KPU merilis jumlah terakhir korban meninggal baik petugas pemilu, KPPS maupun Panwas mencapai 554 orang. (sumber KPU)<sup>5</sup>

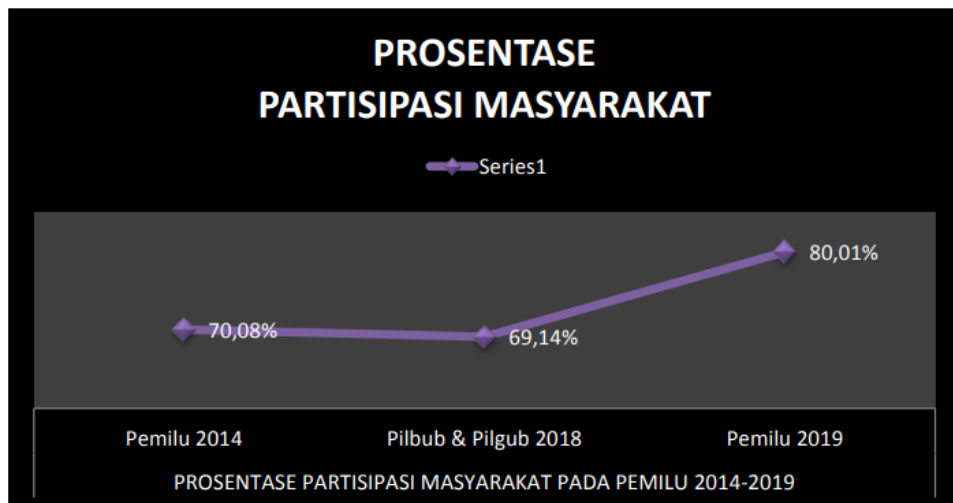
**Tabel 1.1**

**Tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Nganjuk pada pemilihan umum tahun 2014, 2018, dan 2019**

No.	Tahun	DPT	Pengguna hak pilih	Presentase kehadiran
1.	Pilpres 2014	874.919	612.241	70,08%
2.	Bupati/gubernur 2018	848.657	587.761	69,14%
3.	Pilpres 2019	859.478	693.770	80,01%

Sumber: KPU Kab.Nganjuk

<sup>5</sup> *Ibid*



Sumber: Dokumen Laporan pemilu 2019

### Grafik 3.1 Prosentase Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2014-2019

Berdasarkan tabel diatas tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Nganjuk dari tiga pemilihan umum terakhir mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Pada tahun 2014 jumlah partisipasi dengan suara tidak sah sedikit jumlahnya, pada tahun 2018 jumlah partisipasi menurun namun jumlah suara tidak sah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Keadaan mulai membaik ketika pemilihan umum serentak tahun 2019, akan tetapi meskipun jumlah partisipasi bertambah dan suara tidak sah mengalami penurunan. Hal ini jika dibandingkan tahun 2014, jumlah suara tidak sah tetap masih lebih tinggi tahun 2019. Tentunya menjadi tugas KPU untuk mengevaluasi Kembali strategi komunikasi yang dipakai dalam sosialisasi pemilu.

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU selama ini masih belum membuat masyarakat memahami siapa yang dipilih dan apa pentingnya menggunakan hak pilih. Mengingat masih banyak masyarakat

yang mengesampingkan pemilihan umum, karena dianggap kurang begitu penting bagi mereka. Berdasarkan data yang menunjukkan menurunnya intensitas dalam menggunakan hak pilih dari tahun-ketahun, menjadi permasalahan yang menjadi latar belakang untuk mengangkat judul **“Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Nganjuk Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Nganjuk”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian difokuskan pada bentuk strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum(KPU) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilu 2019 di kabupaten Nganjuk diajukan pertanyaan seperti berikut.

1. Bagaimana Strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Nganjuk?
2. Apa faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Nganjuk?
3. Apa hambatan-hambatan komunikasi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum kabupaten nganjuk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Mendeskripsikan strategi KPU Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu.
2. Menganalisis faktor dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Nganjuk
3. Mengetahui hambatan KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilu di Kabupaten Nganjuk.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh informasi yang dapat bermanfaat antara lain:

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan sumbangan ilmiah, pemikiran dan ide untuk memahami strategi komunikasi dalam meningkatkan partisipasi pemilu.
- b. Sebagai referensi bagi penelitian berikutnya

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan:

- a. Dapat bermanfaat bagi peneliti tentang KPU berikutnya

- b. Bagi jurnalis yang mencari sumber karya ilmiah tentang pemilu 2019.
- c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi lembaga terkait dengan pemilihan umum di Kabupaten Nganjuk.
- d. Penelitian ini nantinya memperkaya pengetahuan masyarakat tentang strategi komunikasi yang dipakai KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilu.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan katalog skripsi Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, penulis belum menjumpai ataupun menemukan penelitian dengan objek dan pendekatan yang sama, tetapi ada penelitian yang sejenis peneliti gunakan yakni:

*Pertama*, Skripsi dengan penelitiannya yang berjudul "Strategi Komunikasi laznez yatim mandiri cabang gresik dalam mencari donatur". Oleh Ahmad Rizal Ansori (2019). jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan bukan berupa angka-angka, melainkan data dai hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Hasil penelitian yang didapat, strategi komunikasi laznez yatim mandiri gresik mengemas sebaik mungkin pesan yang akan disampaikan kemasyarakat baik melalui majalah atau face to face, strategi lain dengan menawarkan program serta event di yatim mandiri cabang gresik. Perbedaan dengan



penelitian yang baru ialah dari sisi wilayah atau tempat yang diteliti Gresik dengan Nganjuk, selain itu perbedaan lainnya dari subjeknya. Penelitian pertama anggota Laznaz Yatim Mandiri sementara subjek penelitian terbaru komisioner anggota KPU. Strategi komunikasi ini mengarah pada Laznaz Yatim Mandiri sedangkan penelitian saya di Komisi Pemilihan Umum. Persamaannya sama membahas tentang teori strategi komunikasi.<sup>6</sup>

*Kedua*, Skripsi berikutnya milik Erwanda Selviana (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata Ponorogo dalam Mempromosikan Program Tahun Wisata 2019". Peneliti ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tujuan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata tertulis dan mendeskripsikan hasil wawancara dari objek penelitian. Hasil dari penelitian yang didapat strategi yang dipakai humas dalam mempromosikan wisata dengan menetapkan komunikator, target sasaran, memilih media yang nantinya dimanfaatkan sebagai media penyebarluasan informasi wisata. Pemanfaatan media sosial, media konvensional, baliho, iklan mobil turut dilakukan sebagai upaya strategi dinas pariwisata Kabupaten Ponorogo. Perbedaan dengan penelitian yang baru ialah dari sisi wilayah atau tempat yang diteliti Ponorogo dengan Nganjuk, selain itu perbedaan lainnya dari subjeknya. Penelitian pertama ke Seksi Promosi dan

---

<sup>6</sup> Ahmad Rizal Anshori, *Strategi Komunikasi Laznaz Yatim Mandiri Cabang Gresik Dalam Mencari Donatur* (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya 2019)

Pengelolaan Data Pariwisata sementara subjek penelitian terbaru komisioner anggota KPU. Strategi komunikasi ini mengarah pada dinas pariwisata sedangkan penelitian saya di komisi pemilihan umum. Persamaannya sama membahas tentang teori strategi komunikasi.<sup>7</sup>

*Ketiga*, Jurnal online dengan penelitian yang berjudul "Strategi komunikasi humas kota bandung melalui media sosial instagram dalam meningkatkan citra pemerintahan kota bandung". Oleh Reza antoni (2019). Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi deskriptif, hal ini dikarenakan peneliti ingin menghasilkan data berupa deskripsi mengenai strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas Kota Bandung Melalui Media Sosial Instagram dalam Meningkatkan Citra Pemerintahan Kota Bandung. Hasil penelitian yang didapat, humas kota bandung menggunakan strategi komunikasi pemanfaatan penuh gambar dan kata-kata dalam setiap kegiatan atau acara tertentu. Perbedaan dengan penelitian yang baru ialah dari sisi wilayah atau tempat yang diteliti bandung dengan nganjuk, selain itu perbedaan lainnya dari subjeknya. Penelitian pertama ke anggota humas kota bandung sementara subjek penelitian terbaru komisioner anggota KPU. Strategi komunikasi ini mengarah pada humas kota bandung sedangkan penelitian saya di komisi

---

<sup>7</sup> Erwanda Selviana, *Strategi komunikasi dinas pariwisata ponorogo dalam mempromosikan program tahun wisata 2019 (Skripsi, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo 2019)*

pemilihan umum. Persamaannya sama membahas tentang teori strategi komunikasi.<sup>8</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mendalami penemuan serta memahami apa yang yakni penelitian sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa hipotesis, dengan metode alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukan berdasar jumlah atau kuantitas, melainkan kualitas berdasarkan hasil yang diamati.

Hakikatnya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena (fenomenologis) tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. hal yang dialami subjek penelitian bisa seperti perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan, dan lain sebagainya, dengan cara deskriptif yang berupa kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah.<sup>9</sup>

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa yang ada. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan

---

<sup>8</sup> Reza Antoni, Strategi komunikasi humas kota bandung melalui media sosial instagram dalam meningkatkan citra pemerintahan kota bandung. (<http://elibrary.Unikom.ac.id>), diakses 24 November 2021

<sup>9</sup> M Syahrani Jailani, *Ragam Penelitian Qualitative*, (Edu-Bio, (4), 42-43, 2013), 41

utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti dengan tepat nanti.<sup>10</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, yang beralamat di Jl. Widias, Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan januari s/d februari 2022.

## **3. Subyek dan Obyek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah sesuatu yang diteliti baik berupa benda, orang maupun instansi tertentu. Subyek penelitian adalah sumber tempat memperoleh informasi. Dalam penelitian sendiri, termasuk unit penelitian menitik fokuskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk terutama devisi yang merancang tentang teknis penyelenggara dan divisi sosialisasi, Pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Obyek penelitian adalah suatu keadaan yang menjadi pusat penelitian dan sasaran peneliti. Masalah apa yang ingin diteliti atau suatu masalah yang dipecahkan atau dibatasi melalui penelitian. Obyek penelitian ini adalah strategi komunikasi KPU Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan Partisipasi pemilih.

---

<sup>10</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 22.

#### 4. Data dan Sumber data

##### a. Jenis data

data yang penulis pakai dibagi menjadi dua bagian, yakni data primer dan data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

##### 1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti dapat berupa wawancara.<sup>11</sup> Dalam pengumpulan data primer melalui wawancara terhadap komisioner KPU Kabupaten Nganjuk mengenai strategi komunikasi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih di kabupaten nganjuk.

##### 2) Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung sebagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan di KPU kabupaten Nganjuk. Data sekunder dalam penelitian ini memberikan keterangan tidak langsung bisa berupa referensi buku-buku, arsip-arsip, serta artikel ilmiah yang nantinya bisa menguatkan data primer.

##### b. Sumber data

##### 1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang

---

<sup>11</sup> Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, (Medan: USU Press, 2010), 2.

diperoleh secara langsung yang didapat dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu, kelompok maupun organisasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pujiono selaku Ketua KPU Nganjuk, Muchiyin Divisi Perencanaan, Data ,dan Informasi, Nanang Divisi Teknis dan Pengembangan, Yudha Selaku Divisi Hukum dan Pengawasan, dan Wahyu selaku Petugas KPPS.

## 2) Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber kedua data yang dibutuhkan.<sup>12</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen KPU Nganjuk dan pemilih yang diwawancarai, Website KPU Nganjuk, Facebook, Tweeter, Instagram, Youtube KPU Nganjuk.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang akan digunakan peneliti adalah metode pengumpulan data seperti:

### a. Observasi

Observasi merupakan cara yang sangat baik mengawasi perilaku subyek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan model observasi *non partisipatif* yakni dalam melakukan

---

<sup>12</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 122

pengamatan tidak aktif. Artinya peneliti tidak terlibat banyak dalam kegiatan subyek penelitian dan tidak berinteraksi dengan mereka secara langsung. Peneliti hanya mengamati interaksi social yang mereka ciptakan.<sup>13</sup> Metode observasi ini dilakukan untuk mengambil data dan informasi tentang Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang megarahkan terhadap permasalahan tertentu. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, wawancara ini bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Buku pedoman wawancara yang digunakan berupa garis besar masalah yang akan ditanyakan.<sup>14</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang berupa catatan penting, notulen, transkrip, agenda dan lain yang telah lalu berupa tulisan, gambar, karya monumental seseorang atau organisasi.<sup>15</sup> Dokumentasi peneliti ambil berupa foto, hasil wawancara tertulis serta foto kegiatan yang

---

<sup>13</sup> Djunaidi Ghonny dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media. 2012. Hal 164.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 197.

<sup>15</sup> Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2015), 94

dilakukan KPU Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan partisipasi pemilih

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data, penelitian ini menggunakan Teknik analisis data model Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung dalam periode tertentu. Analisis data ini dilakukan dengan interaktif juga berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga seluruh datanya jenuh.

Analisis data model Miles dan Huberman dilakukan melalui tiga tahap yakni:<sup>16</sup>

### a. Reduksi data

Reduksi data berarti rangkum atau merangkum, memilih hal yang pokok, m emfokuskan pada hal yang penting, mencari pola dan temanya. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian melalui penyederhanaan, pengabstrakan, serta tranformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Tahapan-tahapan reduksi data meliputi:

- 1) Membuat ringkasan
- 2) Mengkode

---

<sup>16</sup> Sugeng Puji Leksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016), 152.



- 3) Menelusuri tema
- 4) Membuat gugus-gugus
- 5) Membuat partisi
- 6) Menulis memo.

b. Penyajian data

Penyajian data yakni menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi dalam merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab apa yang menjadi rumusan masalah, karena didalam rumusan masalah penelitian kualitatif bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada dilapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang disajikan berupa deskripsi atau gambaran yang awalnya belum jelas menjadi jelas dan dapat berupa hubungan interaktif dan hipotesis. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dapat dilakukan setelah penelitian dilapangan.

## 7. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data yakni menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misal, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan tulisan gambar atau foto. Kemudian memberikan pandangan yang berbeda mengenai yang diteliti.

Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data yang ditemukan benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karenanya banyak cara dapat dimiliki dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

## 8. Sistematika pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, peneliti akan menggambarkan alur bahasan yang relevan mengenai penelitian yang akan ditulis. Pembahasan dalam penelitian ini akan menjadi lima bab.

Bab pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini penulis memaparkan tentang pendahuluan sebagai pengantar skripsi yang akan dibahas, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, Landasan Teori. Berisi tentang pengertian komunikasi, strategi komunikasi, partisipasi politik, pemilu.

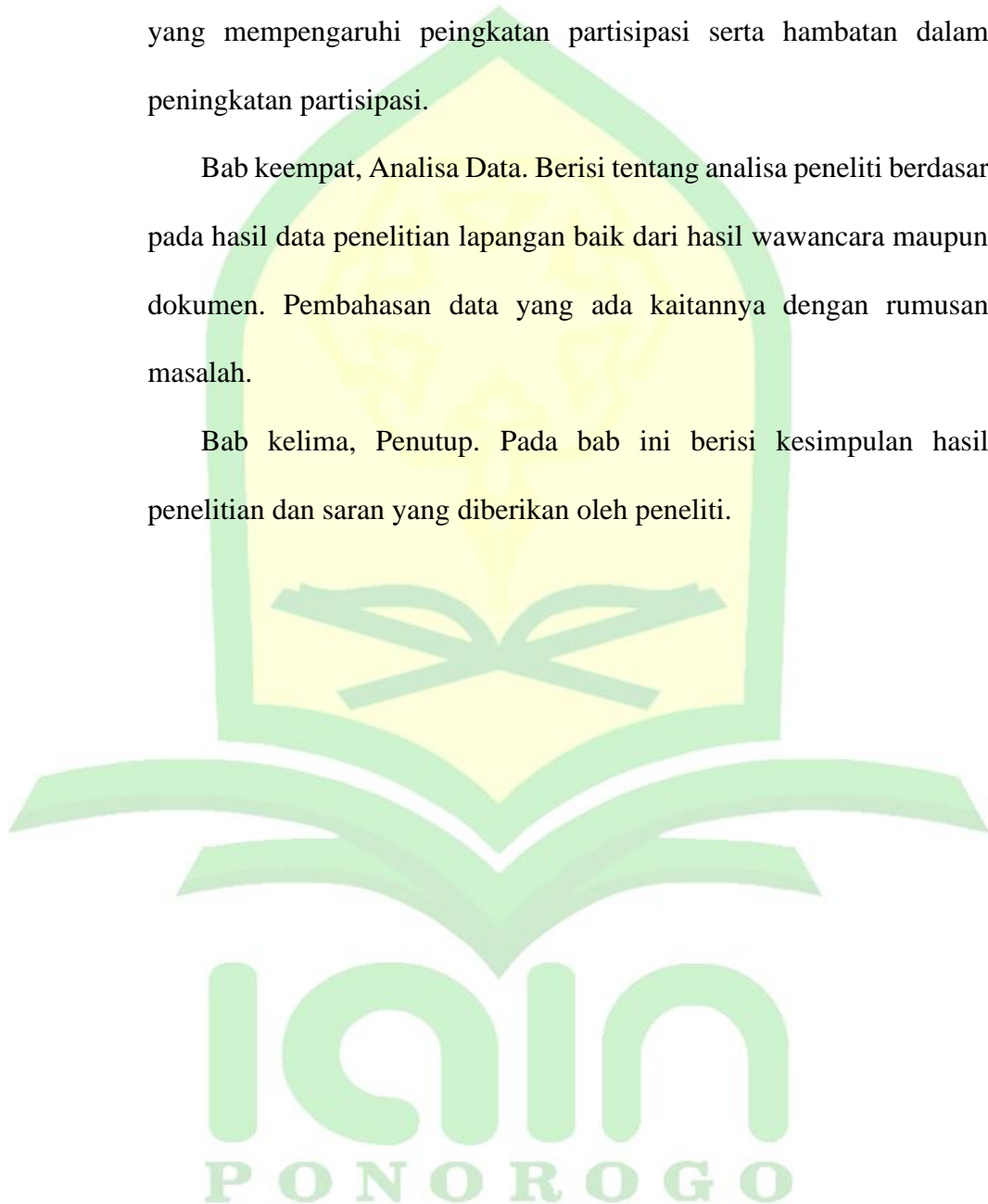
---

<sup>17</sup> Bachri. Bachtar S. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Teknologi Pendidikan, Vol.10 No. 1, April 2010. Hlm 55-57.

Bab ketiga, Hasil Penelitian. Peneliti memaparkan hasil data penelitian di Lapangan yang sudah dilakukan oleh peneliti. Berisi tentang deskripsi umum KPU, paparan data strategi komunikasi, faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi serta hambatan dalam peningkatan partisipasi.

Bab keempat, Analisa Data. Berisi tentang analisa peneliti berdasar pada hasil data penelitian lapangan baik dari hasil wawancara maupun dokumen. Pembahasan data yang ada kaitannya dengan rumusan masalah.

Bab kelima, Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti.



## BAB II

### STRATEGI KOMUNIKASI DAN PARTISIPASI POLITIK

#### A. Komunikasi

##### 1. Pengertian Komunikasi

Komunikasi secara istilah berasal dari kata *communis* yang mempunyai arti kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang ataupun lebih. Kata komunikasi mempunyai Bahasa latin *communico* yang berarti membagi. Komunikasi secara umum yakni, suatu pertukaran proses simbolik yang menghendaki orang mengatur lingkungan dengan membangun hubungan antar sesama manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta adanya usaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku.<sup>1</sup>

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin *communis* yang berarti “Sama”, *communico*, *communication*, atau *communicare* yang berarti “membuat sama”. Istilah pertama komunis paling sering disebut sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata lainnya yang mirip. Kata lain yang mirip dengan komunikasi adalah komunitas *community* yang juga menekankan kesamaan atau kebersamaan. Komunitas adalah sekelompok orang yang berkumpul atau hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu, dan mereka berbagi makna dan sikap. Tanpa komunikasi

---

<sup>1</sup> Sutrisna Dewi, *Komunikasi Bisnis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 2.

tidak akan ada komunitas.<sup>2</sup>

Komunikasi ada dua ahli berbeda tentang komunikasi, seperti yang diungkapkan Raymond S. Ross, komunikasi adalah suatu proses menyotir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa, sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksud oleh komunikator.<sup>3</sup> sedangkan Menurut Rogerts dan D. Lawrence, Ilmu komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.<sup>4</sup>

Berdasarkan paparan definisi komunikasi secara Bahasa, pengertian komunikasi berdasarkan etimologi yakni komunikasi sesuatu hal yang dilakukan dengan lambang-lambang atau Bahasa yang mempunyai kesamaan arti antara komunikator atau orang yang memberi pesan dengan komunikan atau orang yang menerima pesan.<sup>5</sup>

Definisi komunikasi diatas cukup banyak yang dikemukakan berdasarkan ahli komunikasi, namun demikian dari beberapa definisi komunikasi dapat diambil benang merah, bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu pesan dengan tujuan memberi pendapat untuk

---

<sup>2</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 46.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 69

<sup>4</sup> Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 22.

<sup>5</sup> Roudhonah, *Ilmu Komunikasi*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 22.

mengubah sikap atau perilaku baik menggunakan lisan, maupun dengan media. Dengan kata lain, adanya komunikasi yang baik agar nantinya pesan yang ditujukan bisa tersampaikan dengan baik, tanpa ada salah artian terhadap kata yang diucapkan.

## 2. Hambatan komunikasi

Dalam pelaksanaan koordinasi untuk mencapai komunikasi yang efektif, seringkali organisasi menghadapi hambatan-hambatan dalam proses komunikasi di lapangan. Hambatan ini biasa disebut distorsi, dimana seperti yang disampaikan Ludlow dan Panton, hambatan atau kendala dalam setiap berkomunikasi akan selalu ada. Distorsi atau hambatan dalam komunikasi akan selalu terjadi ketika proses berkomunikasi. Penyebab terjadinya distorsi antara lain seperti *status effect* atau perbedaan status sosial, *semantic problems*, *perceptual distortion* atau makna kalimat, *cultural differens* atau perbedaan latar belakang, *physical distraction* atau gangguan fisik, *poor of communication channel* atau gangguan media komunikasi *And no feedback* atau tidak adanya respons.<sup>6</sup>

## 3. Strategi komunikasi

### a. Pengertian Strategi Komunikasi

Strategi hakikatnya terdiri atas perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) dalam mencapai suatu tujuan. Roga dari

---

<sup>6</sup> Dwi Harivarman, Jurnal *Hambatan Komunikasi Internal di Organisasi Pemerintahan, FISIP Unair*, Surabaya

harfied cangara mengatakan Batasan strategi komunikasi sebagai suatu rencana yng dibuat untuk mengubah tingkah laku dari seseorang atau orang lain melalui berbagai pandangan dan sudut lain agar mendapat gagasan baru.

Jembatan penghubung kebijakan dengan tujuan, kata lain dari strategi. Secara umum, strategi merupakan konsep yang menjurus pada jaringan pemikiran, gagasan, pemahaman yang mendalam berdasar pengalaman, tujuan strategi, mempunyai keahlian dalam strategi berdasar presepsi yang nantinya ada harapan yang membantu dalam mencapai tujuan.<sup>7</sup>

Keberhasilan dalam mencapai tujuan kegiatan komunikasi secara aktif banyak ditentukan oleh bagaimana bentuk strategi komunikasi. dengan kata lain jika strategi komunikasi yang baik tidak ada, maka bukan tidak mungkin nantinya timbul pengaruh negative. Strategi komunikasi merupakan bentuk perpaduan antara perencanaan komunikasi (*communication planning* ) dengan manajemen komunikasi (*communication manajemen*). Perpaduan dua ini nantinya bisa mencapai tujuan. Strategi komunikasi yang baik harus bisa menunjukkan bagaimana strategi dalam operasionalnya secara praktis dan mudah diterima, tentunya dengan variasi setiap situasi dan kondisi.

---

<sup>7</sup> Onong Uchajana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 29

Tujuan dari strategi komunikasi terdiri dari tiga tujuan menurut R. Wayne, Brent D. Peterson dan M. Dallas dalam buku yang berjudul *Techniques for Effective Communication* yakni<sup>8</sup> :

- 1) *To secure understanding*, yaitu memastikan bahwa komunikan bisa mengerti pesan yang telah diterima.
- 2) *To establish acceptance*, yaitu apabila komunikan sudah dapat mengerti dan menerima pesan, maka penerima pesan tersebut harus dibina.
- 3) *To motivate action*, yaitu setelah menerima pesan tersebut maka kegiatan itu harus dimotivasikan.

b. Komponen sasaran strategi komunikasi

Pengembangan strategi komunikasi membutuhkan pemikiran yang memperhitungkan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat, karenanya lebih baik jika strategi komunikasi mempertimbangkan komponen komunikasi secara berturut-turut dari komunikan sebagai target, media , pesan dan komunikator. komponen yang perlu diperhatikan seperti:<sup>9</sup>

1) Mengenali sasaran komunikasi

Sasaran komunikasi tergantung pada tujuan utama komunikasi tersebut, apakah metode ini untuk mengetahui (metode informatif) atau komunikasi ini bertujuan untuk

<sup>8</sup> Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 18

<sup>9</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. (cet. 1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 40



Tindakan (persuasive atau metode instruktif). Dengan tujuan apapun diharapkan komunikan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:<sup>10</sup>

a) Faktor kerangka referensi

Pesan yang akan disampaikan komunikan harus sesuai dengan kerangka referensi. Mengingat kerangka referensi setiap orang akan berbeda dari orang satu ke orang lain. Situasi komunikasi interpersonal jauh lebih mudah dikenali kerangka referensinya dibanding dengan mengenali kerangka referensi komunikan dalam komunikasi kelompok. Kelompok tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda, sehingga lebih sulit mengenali kerangka yang menjadi acuan komunikan dalam komunikasi massa yang bersifat heterogen (bersifat umum atau keseluruhan).

b) Faktor situasi dan kondisi

Situasi komunikasi dalam komunikan yang nantinya bisa diterima oleh komunikator. Situasi disini dapat menghambat jalannya komunikasi meskipun bisa di prediksi tidak menutup kemungkinan bisa datang hambatan komunikasi ketika dilakukan. Kondisi komunikan yang menerima pesan kurang efektif jika penerima pesan kepada komunikan dalam keadaan sedih, marah, sakit atau lainnya.

---

<sup>10</sup> Ibid

Sehingga dalam hal ini penyampaian pesan dalam kondisi sengan sangat direkomendasikan agar pesan yang akan disampaikan tercapai.

## 2) Pemilihan media komunikasi

Pemilihan media komunikasi sangat berpengaruh terhadap proses penyampaian informasi. Cara ini bisa dilakukan dengan memilih beberapa media yang akan menjadi media penyampaian informasi. Pemilihan media yang akan dipakai bergantung pada pesan apa yang akan disampaikan dengan tepat tentunya dengan Teknik pesan yang digunakan sesuai. Media komunikasi seperti cetak dan media audio mempunyai kelebihan serta kekurangan. Seperti halnya media cetak dapat ditinjau berulang kali serta bisa disimpan sebagai arsip atau dokumentasi. Sementara media audio hanya bisa didengar.<sup>11</sup>

## 3) Pengkajian tujuan pesan komunikasi

Seorang komunikator akan melakukan pengkajian tujuan pesan komunikasi berulang kali. Dengan tujuan agar seorang komunikator bisa menyampaikan pesan sesuai dengan tujuan. Isi pesan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari banyak jenis simbol yang disampaikan, seperti dalam televisi, film atau surat kabar. Simbol yang sering digunakan dan yang paling penting adalah simbol Bahasa, karena jika penyampaian Bahasa salah

---

<sup>11</sup> Ibid

akan mengubah isi pesan yang akan disampaikan. Akan banyak juga kesalahan informasi jika tata Bahasa karena kesalahan informasi dan interpretasi.<sup>12</sup>

#### 4) Peranan komunikator dalam komunikasi

Faktor peranan komunikator dalam komunikasi ada dua, daya tarik sumber dan kredibilitas sumber.<sup>13</sup>

##### a) Daya Tarik sumber

Komunikator bisa dikatakan berhasil apabila dalam komunikasi dapat mengubah sikap, pendapat dan perilaku komunikan melalui Tarik-menarik jika antara komunikan dan komunikator merasa ada kesamaan sehingga mematuhi isi pesan yang disampaikan komunikator.

##### b) Kredibilitas sumber

Faktor komunikasi bisa sukses lancar yang kedua yakni adanya unsur kepercayaan komunikan pada komunikator. Kepercayaan ini sangat penting terkait dengan keahlian yang dimiliki komunikator. Contohnya seperti seorang dokter bisa dipercaya ketika menyampaikan sesuatu terkait dengan Kesehatan, seorang polisi akan dipercaya ketika membahas tentang masalah keamanan dan ketertiban umum.

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. (cet. XX, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 39

Berdasar dua faktor ini, komunikator dalam menghadapi komunikasi harus berempati, atau istilah mudahnya mampu memposisikan dirinya ke oranglain. Dengan kata lain bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain.<sup>14</sup>

c. Bentuk strategi

Menurut Newman terdapat empat pilihan strategi yaitu :<sup>15</sup>

1) Strategi penguatan.

Strategi ini dapat digunakan untuk kontestan yang terpilih karena mempunyai citra tertentu, dibuktikan dengan kinerja politik selama mengemban jabatan public tertentu. Hal ini dapat dilihat dari upaya dalam meningkatkan partisipasi dengan cara melihat kinerja KPU, meningkatkan koordinasi antar anggota KPU, meningkatkan kapasitas dan kualitas KPU dengan cara memperkuat komunikasi antar anggota KPU dan dengan publik.

2) Strategi rasionalisasi

Strategi rasionalis dapat dilakukan kepada kelompok pemilih yang sebelumnya memilih kontestan karena kontestan tersebut berhasil mengembangkan citra tertentu yang disukai pemilih, akan tetapi kinerjanya tidak sesuai dengan citranya.

Dengan kelompok seperti ini, KPU melakukan upaya dengan

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Andrianus Pito, *Mengenal Teori-teori Politik*, (Bandung: Nuansa, 2006) 211.

memberikan penyebaran informasi calon pasangan melalui berbagai media. Antara lain, melalui media cetak (koran atau selebaran kertas berisi calon yang ikut pemilihan), media suara (radio), gambar atau baliho dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat.

### 3) Strategi bujukan

Strategi ini dapat diterapkan oleh kelompok atau organisasi yang mempersepsikan memiliki citra tertentu tetapi juga memiliki kinerja yang cocok dengan lainnya. Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada masyarakat sebagai pemilih dengan berbagai kegiatan, kegiatan ini bertujuan menarik pemilih dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Kegiatan yang dilakukan seperti, Program jalan sehat, dialog KPU langsung kepada masyarakat atau *KPU goes to campus*.<sup>16</sup>

### 4) Strategi konfrontasi

Penerapan strategi ini dapat dilakukan kepada pemilih yang telah memilih kontestan dengan citra tertentu, tetapi dianggap tidak cocok oleh pemilih kemudian kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan pemilih. Langkah yang diambil KPU dalam menanggapi seperti ini dengan memberikan semacam sosialisasi cara memilih dan kerugian jika tidak

---

<sup>16</sup> Ibid

memilih. Kerugian yang didapat ketika tidak memilih, akan hilang hak politik. Kelompok sasaran yang mendapat sosialisasi seperti, pelajar dan mahasiswa, kelompok perempuan, keagamaan, marginal dan kelompok pemilih pemula.<sup>17</sup>

#### d. Fungsi Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam komunikasi, dimana dalam strategi komunikasi membuat proses komunikasi berhasil hingga pesan atau informasi yang ingin disampaikan sesuai dengan tujuan awalnya. Keberhasilan dan kegagalan suatu kegiatan komunikasi sangat ditentukan oleh strategi komunikasi.

Strategi komunikasi mempunyai beberapa fungsi<sup>18</sup>, baik secara makro (*planned multimedia strategy*) maupun secara mikro (*single communication medium strategy*) diantaranya seperti :

- 1) Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat komunikatif, persuasive dan instruktif secara sistematis kepada sasaran dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal.
- 2) Menjembatani “kesenjangan budaya” atau (*cultural group*) akibat dari kemudahan yang diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Effendy, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992),

<sup>19</sup> Ibid

## B. Partisipasi politik

### 1. Pengertian partisipasi politik

Secara umum Partisipasi politik merupakan aktivitas warga yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara. Partisipasi politik disini bersifat sukarela, bukan berdasar mobilisasi oleh individu, partai ataupun negara lain yang berkuasa

Aktivitas warga negara tak lepas dari proses politik yang berjalan pada negara tersebut. Partisipasi politik warga negara mempengaruhi pembuatan dan implementasi dalam menentukan pemimpin dalam pemerintahan. Kegiatan yang termasuk dalam partisipasi warga bisa seperti membayar pajak, melaksanakan keputusan, meminta tuntutan, mengajukan kritik, dan koreksi terhadap implementasi kebijakan yang telah ada. Selain itu, partisipasi warga bisa mendukung dan menentang para pemimpin yang tidak sesuai dengan undang-undang, bisa mengusulkan pemimpin serta bisa memilih perwakilan dalam pemilihan umum.<sup>20</sup>

Partai politik mempunyai fungsi mendorong, memberi peluang dan mengundang anggota masyarakat untuk menggunakan partai politik sebagai kegiatan yang berjalan beriringan dengan proses politik. Partai politik bisa dikatakan forum atau ruangan untuk partisipasi politik.

---

<sup>20</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 118

Fungsi yang dimiliki partai politik lebih tinggi dalam sistem politik demokratis daripada sistem politik totaliter, dimana sistem politik yang terakhir mengharapkan kepatuhan dan ketaatan dari warga negara daripada kegiatan independent atau kegiatan mandiri.<sup>21</sup>

Partisipasi politik menurut Surbakti dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Partisipasi aktif

Partisipasi aktif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan *output* dalam politik. Hal-hal yang termasuk bagian dari partisipasi aktif adalah mengusulkan kebijakan umum, mengusulkan berbagai opsi kebijakan alternatif dengan kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk memperbaiki kebijakan, membayar pajak, serta memilih pemimpin pemerintahan.

b. Partisipasi pasif

Partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses keluaran. Kegiatan yang disebut partisipasi pasif adalah kegiatan yang mematuhi pemerintah, menerima dan menerapkan setiap keputusan pemerintah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Rahmawati Halim dan Muhalin Lalongan, *Partisipasi Politik Masyarakat Teori dan Praktik* (Makassar: CV. Sah Media, 2016), 99



## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang dalam suatu kegiatan. Seperti yang diungkapkan Myron Weiner, ada 5 faktor yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih lebar dalam proses politik.<sup>23</sup>

### a. Modernisasi

Modernisasi yang terjadi saat ini banyak di segala bidang berkaitan dengan pertanian, industrialisasi, peningkatan tingkat pendidikan, meningkatnya arus urbanisasi, meluasnya peran media massa dan media komunikasi. Kemajuan itu berakibat pada meningkatnya partisipasi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya, terutama di wilayah perkotaan, untuk turut serta dalam kekuasaan politik. Seperti halnya dari kaum buruh, para pedagang dan para pengusaha besar yang sibuk berbisnis.

### b. Adanya perubahan struktur kelas esensial

Munculnya kelas esensial seperti kelas menengah dan kelas pekerja baru semakin meluas dalam era industrialisasi. Kemunculan kelas ini bersamaan dengan tuntutan-tuntutan yang baru, nantinya akan mempengaruhi kebijakan dari pemerintah.

---

<sup>23</sup> Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia Dalam Prespektif Struktural Fungsional*, (Surabaya: SIC, 2002), 128

c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa

Kaum intelektual kian meningkat membuat ide nasionalisme, liberalisme dan egaliterisme membangkitkan tuntutan-tuntutan massa untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan.

d. Adanya konflik diantara pemimpin politik

Pemimpin politik yang saling memperebutkan kekuasaan, seringkali menghalalkan segala cara untuk mendapat dukungan massa dalam jumlah banyak. Dalam hal ini seringkali terjadi mobilisasi partisipasi massa agar mendapat massa yang besar.

e. Keterlibatan pemerintah yang meluas terkait urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan

Keterlibatan pemerintah yang kian meluas ruang lingkupnya seringkali membuat tumbuhnya tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam mempengaruhi perbuatan keputusan politik. Hal ini termasuk konsekuensi dari perbuatan pemerintah yang terlalu luas dalam segala bidang masyarakat.<sup>24</sup>

Faktor lain yang mempengaruhi partisipasi politik yakni, perubahan dan reformasi politik yang terus ada dan dengan visi misi yang visioner membuat masyarakat sangat antusias sehingga menyentuh hati masyarakat untuk tergerak menggunakan suaranya. Selain itu kegiatan kampanye juga berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat serta citra paslon baik berdasarkan citra sosial, citra

---

<sup>24</sup> Ibid

kandidat, citra kandidat religion dan aspiratif, dan peristiwa individunya dengan rekam jejak yang baik selama berorganisasi dan berkariyer, berpengaruh terhadap partisipasi politik pemuda atau masyarakat.<sup>25</sup>

### C. Pemilihan Umum (Pemilu)

#### 1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Salah satu cara untuk menentukan seseorang untuk menjadi pemimpin rakyat, maka diadakannya pemilu. Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses dimana memilih orang untuk mengisi suatu jabatan politik tertentu. Jabatan ini beragam adanya mulai dari presiden, wakil rakyat diberbagai tingkatan pemerintahan, kepala daerah, bahkan sampai kepala desa. Pemilihan ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>26</sup> Pada lingkup lainnya, pemilu juga dibiasakan mulai di bangku sekolah dengan mengadakan pemilu ketua OSIS ataupun ketua kelas. Meskipun kata “pemilihan” yang sering digunakan.

Pemilu merupakan salah satu upaya untuk mempengaruhi rakyat (persuasive) tidak memaksa, dengan melakukan retorika, hubungan politik, komunikasi massa, *lobby* dan lain sebagainya. Meski agitasi dan

---

<sup>25</sup> Budi Antomo dkk, “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018” *Jurnal Aspirasi*, 2, (Agustus, 2021), 46-47

<sup>26</sup> Tim Redaksi BIO, *Undang-undang Pemilu 2019 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), 3.

propaganda sangat dikecam oleh negara demokrasi, akan tetapi dalam kampanye pemilihan umum, Teknik agitasi dan propaganda ini sering dipakai dalam kampanye politik serta dilakukan oleh para kandidat. Proses pemilihan para peserta pemilu menawarkan janji atau visi yang nantinya menarik pemilih untuk memilih mereka.

Pemilu secara konseptual merupakan sarana mengimplementasikan kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diterapkan melalui “penyerahan” Sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakil parlemen maupun pemerintahan. Dengan demikian nanti ditengah jabatan rakyat bisa meminta pertanggungjawaban kekuasaan pemimpin kepada pemerintah.<sup>27</sup>

Pemimpin daerah seperti anggota parlemen atau DPR merupakan wakil rakyat, idealnya semua orang yang menduduki bangku parlemen harus dipilih oleh rakyat yang diwakilinya melalui pemilihan secara hukum dan dapat dinilai bebas, jujur dan adil. Oleh karena itu pemilu merupakan komponen penting didalam suatu negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan.

Prinsip negara hukum dengan sistem perwakilan melalui pemilu mempunyai kaitan erat sebab melalui rakyat nantinya pemilu dapat dipilih wakil-wakilnya yang berhak membuat suatu prodeuk hukum

---

<sup>27</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 219-221

untuk ditaati bersama dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.<sup>28</sup>

Tujuan diadakannya pemilihan umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan dengan tujuan nantinya pemimpin tersebut mendapat dukungan kuat dari rakyat. Sehingga nantinya mereka mampu menjalankan fungsi negara kekuasaan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Asas pemilu dalam negara diseluruh dunia memiliki itu, seperti asas yang dikemukakan oleh Chainur, Suatu asas adalah suatu alam pikiran atau cita-cita yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum yang konkret dan bersifat umum atau abstrak (khususnya dalam bidang-bidang hukum yang erat hubungannya dengan agama dan budaya). Dalam konteks inilah eksistensi pemilu sangat dibutuhkan, mengingat secara universal pemilu menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah yang demokratis. Maka pemilu sesuai pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Undang-undang Tahun 2003 tentang pemilihan umum telah menetapkan secara konsisten *enam asas pemilu*, yakni: *Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil*.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2018), 27.

a. Asas Pemilihan Umum

Asas pemilu menurut Undang-Undang pemilu era reformasi telah menetapkan ada enam asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adi. Termasuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 1 dan pasal 2 menetapkan hal yang sama enam asas pemilu tanpa ditambah ataupun dikurangi. Hal ini memberi arti bahwa enam asas ini merupakan prinsip fundamental pemilu. Berikut penjelasan enam asas pemilu, meliputi:<sup>30</sup>

1) Langsung

Asas langsung artinya pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Hal ini dilakukan untuk mencegah resiko kecurangan oleh oknum tertentu.

2) Umum

Umum berarti pemilih bersifat umum atau semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal usia 17 tahun yang telah atau pernah kawin dapat menggunakan hak suaranya. Pemilihan ini bisa diikuti seluruh warga yang memenuhi syarat tanpa terkecuali dan tidak adanya unsur diskriminasi.

---

<sup>30</sup> Ibid

3) Bebas

Artinya setiap warga negara bebas memilih dan menentukan pilihannya tanpa ada pengaruh, paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Dalam memilih setiap warga dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuka hati Nurani.

4) Rahasia

Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin atas rahasia dan tertutup tidak boleh diketahui siapapun kecuali pemilih itu sendiri.

5) Jujur

Jujur dalam penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan, pemerintah dan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan, pemilih pemantau pemilu, pengawas dan semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap jujur.

6) Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan.<sup>31</sup>

b. Hak pilih dalam pemilihan umum

Setiap Warga Negara Indonesia pada hari pemilihan umum sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih, atau sudah pernah

---

<sup>31</sup>*ibid* ,27.

kawin mempunyai hak pilih. Seorang warganegara yang mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, hal ini berlaku jika sudah terdaftar sebagai pemilih. Hak pilih warganegara terdiri dari, hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih).<sup>32</sup>

Warganegara yang mempunyai hak memilih agar terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan seperti:

- 1) Tidak terganggu jiwa/ingatannya.
- 2) Tidak sedang dicabut hak pilihnya, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitupa sebaliknya, apabila warganegara sudah termasuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi tidak memenuhi persyaratan diatas, dengan demikian tidak dapat menggunakan hak pilihnya.<sup>33</sup>

c. **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Penyelenggara pemilu di Indonesia berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU menjadi satu-satunya lembaga penyelenggara yang tertulis dan independen dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang- Undang Penyelenggara Pemilu. Hal itu dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lembaga penyelenggara pemilu

---

<sup>32</sup> Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 168.

<sup>33</sup> *Ibid* 168.



menjadi Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu di Indonesia.



**BAB III**

**STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM**

**MENGGUNAKAN HAK PILIH 2019 DI KABUPATEN**

**NGANJUK**

**A. Deskripsi Umum**

1. Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu lembaga independen yang bertugas sebagai badan penyelenggara pemilihan umum. KPU Kabupaten Nganjuk terletak di Jalan Widas, Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Mempunyai alamat website [www.kpud-nganjukkab.go.id](http://www.kpud-nganjukkab.go.id) dengan Nomor Telp (0358)321642. Saat ini KPU Kabupaten Nganjuk di Pimpin oleh Bapak Pujiono, S. Tp.



*Sumber: Dokumen Penelitian di KPU Nganjuk*

Gambar 2.1 KPU Kabupaten Nganjuk

Alasan mengambil lokasi penelitian ini adalah adanya kenaikan dari partisipasi pemilih tahun 2019 dibanding dengan tahun sebelumnya. Selain itu ketika pelaksanaan pemilu serentak 2019 ada beberapa permasalahan yang dialami peneliti, seperti tentang sosialisasi pemilu yang sepertinya kurang dapat merata serta kurang dipahami oleh para pemilih.

## 2. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk

### a. Visi :

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### b. Misi :

- 1) Membangun Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif;
  - 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Nganjuk
- a. Tugas KPU Kabupaten sebagaimana tercantum di dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu:
    - 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
    - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
    - 4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
    - 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar

pemilih;

- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- 7) Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/kota;
- 10) Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota kepada masyarakat;
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Wewenang KPU Kabupaten sebagaimana tercantum di dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni:
- 1) Menetapkan jadwal di kabupaten/kota
  - 2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat perhitungan suara;
  - 4) Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
  - 5) Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu kabupaten/kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kpud-nganjuk.go.id, diakses 10 februari 2022

#### 4. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Nganjuk



Gambar 2.2 Susunan Organisasi KPU Kabupaten Nganjuk.

#### 5. Profil Divisi

##### a. Ketua KPU

- Nama : Pujiono, S. TP
- Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Nganjuk-Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga.
- No. telp : 081358432990
- Pendidikan : S1 Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor

##### b. Divisi teknis Penyelenggaraan

- Nama : Nanang Wahyudi, SE
- No. telp : 081331555581

- Pendidikan : S1- Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

c. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

- Nama : Kurrotul A'yuni, M.Pd

- No.telp : 085731526287

- Pendidikan :

S1 PAI IAIN Sunan Ampel Surabaya

S2 PAI IAIN Kediri

d. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

- Nama : Muchiyin, S. Th.I

- No. telp : 081259680664

- Pendidikan : S1-Theologi Islam, STAIN Kediri

e. Divisi Hukum dan Pengawasan

- Nama : Yudha Harnanto, SH, MH

- No. Telp : 082245532575

- Pendidikan : S2 Magister Hukum, UNISKA<sup>2</sup>

**B. Strategi Komunikasi KPU Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan umum 2019 di Kabupaten Nganjuk**

Strategi komunikasi merupakan suatu susunan perencanaan dan manajemen yang nantinya menghasilkan suatu kegiatan atau rencana yang terstruktur. Strategi komunikasi yang baik harus bisa menunjukkan

---

<sup>2</sup> Kpud-nganjuk.go.id, diakses 10 februari 2022



bagaimana strategi dalam operasionalnya secara praktis dan mudah diterima, tentunya dengan variasi setiap situasi dan kondisi.

Strategi komunikasi yang diterapkan KPU kepada masyarakat pada pemilihan serentak 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 10 tahun 2018, ada 5 strategi yang diterapkan, seperti yang dikatakan dalam sesi wawancara yang dilakukan peneliti kepada Pak Pujiono

“Strategi komunikasi yang dilakukan KPU sesuai Keputusan KPU ada 5 strategi pertama tatap muka, kedua media massa cetak maupun elektronik, ketiga menggunakan alat dan bahan sosialisasi, keempat dengan media kreasi mural dan kelima menggunakan relawan demokrasi dengan 11 segmen pemilih”<sup>3</sup>

Sosialisasi tatap muka yang diterapkan KPU sampai saat ini masih diterapkan karena dengan metode tatap muka, masyarakat bisa lebih mengerti dan faham terhadap pemaparan penjelasan KPU tentang pemilu serentak 2019. Seiring berkembangnya teknologi saat ini, perkembangan media massa dan elektronik membuat penyampaian pesan ajakan pemilu lebih luas.

Alat dan bahan sosialisasi sebagai bahan penunjang proses sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengenal dan mengerti siapa yang akan dipilih. Kemudian media kreasi mural yang masih dipertahankan karena dianggap mampu menarik partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pak pujiono menambahkan

“Sosialisasi harus berdasar hukum dan peraturan karena ketika ada yang kalah maka KPU akan digugat jika sosialisasinya tidak sesuai dengan hukum.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Transkrip Wawancara 005/W/10-II/2022, 14.15

<sup>4</sup> Transkrip wawancara 010/W/15-III/2022 10.55

Setiap sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU berdasar hukum dan peraturan yang ada. Hal ini dilakukan agar ketika hasil pemilihan keluar, maka KPU tidak akan digugat karena sudah berdasar dengan hukum ketika melakukan sosialisasi. Bentuk kegiatan dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU melakukan berbagai program peningkatan partisipasi masyarakat mulai dari kunjungan ke SMA/SMK/Sederajat, Universitas/kampus, Organisasi Masyarakat. Relawan demokrasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat menggunakan 5 metode yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, antara lain: <sup>5</sup>

1. Simulasi
2. Ceramah/tatap muka
3. Alat bantu
4. Diskusi kelompok
5. Posting materi sosialisasi ke media sosial



<sup>5</sup> Dokumen Laporan Pemliu 2019, 166

*Sumber: Dokumen Laporan Pemilu 2019*

Gambar 2.3 sosialisasi melalui kursus kepemiluan

Dalam proses sosialisasi tentu ada bahan sosialisasi yang digunakan KPU untuk menunjang dalam proses sosialisasi seperti yang dikatakan pak Muchiyin kepada peneliti

“Bahan sosialisasi pengenalan calon dengan pembuatan flyer, pembuatan baliho, kemudian sosialisasi bagaimana menggunakan hak pilih yang benar itu biasanya membuat spesimen surat suara itu tentang bagaimana cara mencoblos yang sah. Bahan sosialisasi yang lain dengan branding-branding mobil, memasang billboard di tempat-tempat strategis, menggunakan flyer yang ditempel dibecak.”<sup>6</sup>

Mobilisasi sosial yang dilakukan KPU dalam menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam sosialisasi pemilu 2019 menjadi salah satu metode KPU mengajak masyarakat secara tatap muka langsung untuk meramaikan pemilu serentak 2019, hal ini disampaikan pak Muchiyin kepada peneliti

“Pernah KPU pada tahun 2019 KPU mengadakan pentas seni budaya jaranan, komunitas musik di nganjuk. Alhamdulillah sosialisasi tahapan, sosialisasi coblosan antusias masyarakat sangat luar biasa. Dilihat dari situ dianggap berhasil, selain itu ada jalan sehat, carfree day itu dengan membawa flyer atau dengan cek pemilih.”<sup>7</sup>

Berbagai kegiatan yang diadakan KPU bertujuan untuk menarik minat masyarakat dalam mengikuti pemilu. Pentas budaya ataupun pertunjukan musik menjadi kegiatan yang mampu menarik masyarakat dengan penampilan tersebut.

<sup>6</sup> Transkrip Wawancara 006/W/15-II/2022, 10.48

<sup>7</sup> Transkrip Wawancara 006/W/15-II/2022, 10.51



Sumber: Dokumen Laporan Pemilu 2019

Gambar 2.4 Sosialisasi Gerakan Sadar Pemilu, melalui pagelaran seni dan budaya.

Penggunaan media baik media konvensional maupun elektronik menjadi salah satu langkah KPU dalam menyampaikan ajakan kepada masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Penggunaan media massa ketika sosialisasi sangat membantu proses sosialisasi pemilihan umum oleh KPU Nganjuk, seperti halnya yang disampaikan pak Muchiyin

“Khususnya saat kampanye dalam hal ini masing-masing calon atau peserta pemilu ada yang berinisiatif menggunakan media massa walaupun sifatnya terbatas, nah itu juga membantu partisipasi peserta pemilu dalam mendulang atau membantu partisipasi penggunaan hak pilih itu juga tinggi karena setiap pemilih ketika mempunyai pilihan, semisal pemilih A kecenderungan ke parpol A itu tinggi maka pemilih itu akan tinggi tingkat kehadirannya. Soal sejauh mana KPU dalam menggandeng media massa dalam mensukseskan kegiatan KPU itu yang jelas sasaran-sasaran berbeda. Kan tidak semua masyarakat bisa ditemui, dengan adanya media massa, media sosial itu sangat membantu membantu KPU dalam mensosialisasikan kepada masyarakat. Tingkat keberhasilan

bagaimana, saya menganggap berhasil juga karena peningkatan partisipasi dari tahun 2014 ke tahun 2019 itu ada peningkatan.”<sup>8</sup>

Kegiatan sosialisasi pada proses tahapan dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya melalui penyebaran beberapa media seperti spanduk, baliho, melalui media massa dan elektronik, media sosial dan website, rapat koordinasi, juga melalui kegiatan tatap muka serta pendidikan pemilih.

Hadirnya media massa sangat membantu KPU dalam mensosialisasikan pemilu. Pada tahun 2019 merupakan tahun melek informasi dan teknologi, para pemuda generasi milenial tentu mempunyai *ponsel* sebagai media penghantar informasi yang sangat cepat. Dalam hal ini KPU juga mengikuti perkembangan teknologi dengan mempunyai akun beberapa media sosial seperti yang dikatakan Pak Muchiyin kepada peneliti

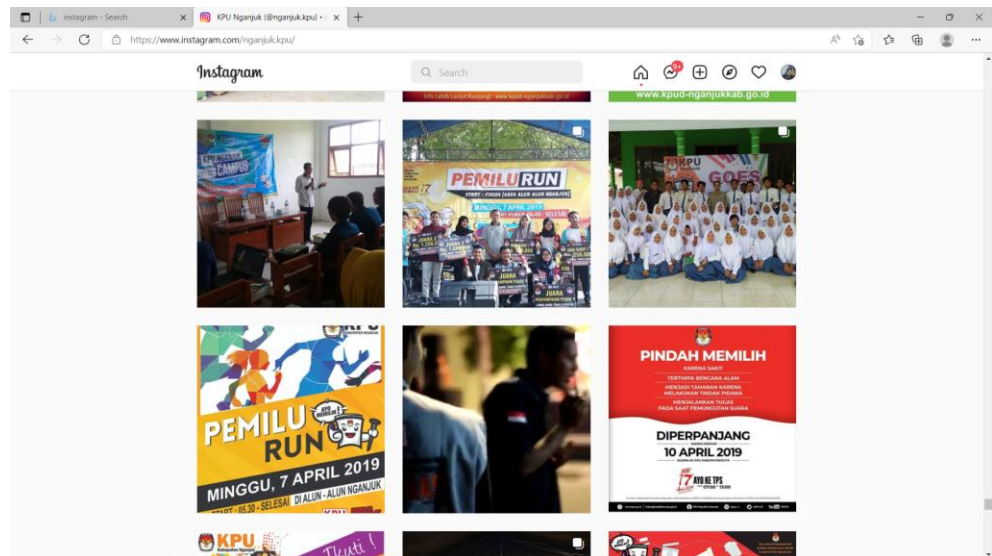
“Pada tahun 2019 dimana tahun tersebut sudah zamannya melek informasi melalui medsos dan sebagainya yang dilakukan tidak hanya serangan darat informasi melalui ppk kpps tetapi juga melakukan informasi full melalui media social KPU seperti *facebook, Instagram, tweeter* dan yang lain-lain. Itu yang dilakukan.”<sup>9</sup>

Media sosial yang ada sekarang sangat membantu proses sosialisasi pemilihan umum oleh KPU. Berbagai jenis laman yang ada dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat, mulai dari pemilih pemula sampai pemilih marjinal. Perkembangan media informasi membuat penyebaran informasi pemilihan umum semakin meluas.

---

<sup>8</sup> Transkrip Wawancara 006/W/15-II/2022, 10.44

<sup>9</sup> Transkrip Wawancara 002/W/08-II/2022, 10.15



Sumber : Akun Instagram KPU Nganjuk

Gambar 2.5 Instagram KPU Nganjuk

Seperti pada gambar pada laman media sosial *Instagram* KPU Nganjuk diatas terdapat dokumentasi kegiatan yang diadakan KPU Nganjuk untuk mengajak masyarakat meramaikan pemilu 2019. Kegiatan seperti *Pemilu Run*, diadakan KPU agar masyarakat antusias dalam pemilu serta bisa mendapat pendidikan pemilih diwaktu pembukaan ataupun ketika acara inti.



Sumber : Website KPU Nganjuk

Gambar 2.6 Website KPU Nganjuk

Laman berikutnya KPU menggunakan *website* KPU Nganjuk untuk mensosialisasikan kegiatan atau agenda apa yang telah dilalui KPU Nganjuk. Selain itu pada *website* KPU Nganjuk digunakan untuk meng-*upload* data pemilih ataupun hasil dari pemilihan.

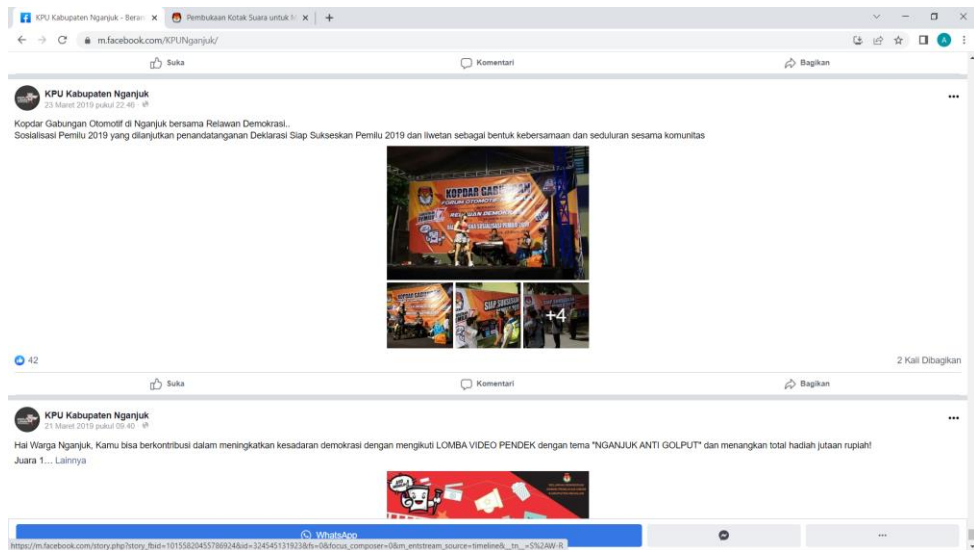


Sumber : Akun Twitter KPU Nganjuk

Gambar 2.7 Tweeter KPU Nganjuk

Penggunaan media sosial berikutnya pada media sosial *tweeter*, pada media ini bertujuan untuk mengajak segmen masyarakat pemilih pemula karena dibandingkan media sosial lain media sosial *tweeter* lebih banyak diisi oleh kalangan pemilih pemula. Pada gambar laman diatas tentang bimbingan teknis yang diadakan KPU untuk para relawan demokrasi yang akan membantu jalannya proses sosialisasi KPU. Relawan demokrasi yang terdiri dari banyak segmen diharapkan mampu membuat peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu 2019.

P O N O R O G O



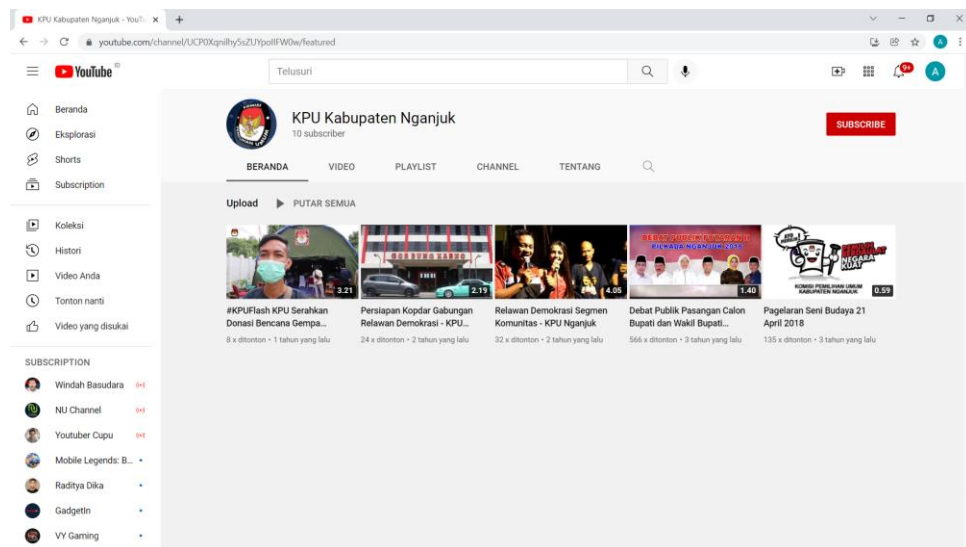
Sumber : Akun Facebook KPU Nganjuk

Gambar 2.8 Facebook KPU Nganjuk

Laman media sosial *Facebook* KPU Nganjuk, pengguna pada laman ini merupakan terbanyak dibanding dengan laman lainnya. Media sosial *facebook* terdapat banyak segmen masyarakat yang gabung didalamnya. Oleh karena itu KPU Nganjuk memaksimalkan media sosial ini bertujuan agar berbagai segmen masyarakat mengetahui kegiatan apa yang diadakan KPU. Pada gambar diatas tentang kegiatan kopdar pada forum otomotif di Nganjuk, kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat yang tergabung atau tertarik di dunia otomotif turut meramaikan jalannya sosialisasi yang dilakukan KPU Nganjuk.

IAIN  
PONOROGO





Sumber : Akun Youtube KPU Nganjuk

Gambar 2.9 Youtube KPU Nganjuk

Media *Youtube* KPU Nganjuk turut menjadi media sosialisasi KPU kepada masyarakat, pada *Channel Youtube* KPU Nganjuk ditayangkan kegiatan relawan demokrasi pada segmen komunitas yang ada di Nganjuk serta persiapan yang dilakukan KPU pada kegiatan kopdar gabungan relawan demokrasi Nganjuk untuk menyampaikan pendidikan pemilih.

Selain untuk membantu KPU dalam menyampaikan pendidikan pemilih, strategi lainnya yang digunakan KPU yakni dengan menggunakan relawan demokrasi yang terbagi atas 11 segmen pemilih. Relawan demokrasi yang direkrut oleh KPU Nganjuk bertujuan membantu jalannya sosialisasi. Pada wawancara yang dilakukan peneliti Ketua KPU pak pujiono mengatakan

“Relawan demokrasi kan orang yang direkrut oleh KPU untuk membantu kegiatan sosialisasi sesuai dengan basisnya atau segmennya. Maka ada relawan dari unsur tokoh agama, relawan dari unsur pemuda, pemilih pemula, ada unsur disabilitas, ada unsur dari kelompok marjinal, ada unsur dari kelompok perempuan, ada unsur

dari sosialisasi yang berbasis kekeluargaan”<sup>10</sup>

Rekrutmen relawan demokrasi pada pemilu 2019, berdasarkan evaluasi dari tahun 2014 sesuai dengan segmen yang ada pada masyarakat, dengan tambahan segmen keluarga dan segmen internet. Segmen internet yang saat ini dibutuhkan karena terbatasnya ruang tatap muka bagi beberapa orang. Hal ini seperti yang dikatakan Pak Muchiyin kepada peneliti

“Sosialisasi dengan tambahan relawan dimulai tahun 2014 dinamakan relawan demokrasi. Evaluasi dari relawan demokarasi 2014 yang pada saat itu dirasa ada pengaruhnya dalam pendulangan partisipasi, peningkatan partisipasi. Maka dari itu, pemilu 2019 KPU juga menggunakan relawan demokrasi. Relawan demokrasi itu terdapat di tiap KPU seluruh Indonesia berjumlah 55 orang, terbagi menjadi 11 segmen. Mulai segmen keagamaan, segmen disabilitas, kelompok marjinal, segmen perempuan, dan segmen lainnya.”<sup>11</sup>

Relawan demokrasi dirasa cukup berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi. Maka dari itu KPU tetap menggunakan Relawan KPU dalam mensosialisasikan pemilu di seluruh Indonesia. Pak Pujiono Relawan KPU tiap kota/kabupaten berjumlah 55 orang yang terbagi atas 11 segmen berbeda, segmen yang telah disebutkan pak muchiyin terdapat dalam dokumen hasil pemilu tahun 2019 yang berisi 11 segmen atau basis lainnya yang belum disebutkan seperti

1. Basis Keluarga
2. Basis Pemilih Pemula
3. Basis Pemilih Muda
4. Basis Pemilih Perempuan
5. Basis Penyandang Disabilitas
6. Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus
7. Basis Kaum Marjinal

---

<sup>10</sup> Transkrip Wawancara 007/W/15-II/2022, 10.27

<sup>11</sup>Transkrip Wawancara 002/W/08-II/2022, 10.10

8. Basis Komunitas
9. Basis Keagamaan
10. Basis Warga Internet dan
11. Basis Relawan Demokrasi<sup>12</sup>

Relawan diatas berjumlah 55 orang masih dianggap belum mampu menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Sosialisasi yang mereka lakukan belum mampu menyentuh masyarakat Nganjuk keseluruhan. Sehingga sosialisasi pemilu pada dasarnya tetap banyak dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU beserta jajarannya) beserta media massa. Metode sosialisasi yang dilakukan KPU sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 10 tahun 2018, ujar Pak Pujiono dengan peneliti:

“Metode sosialisasi yang dilakukan KPU selama sosialisasi kepada masyarakat tentunya sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 10 Tahun 2018, seperti metode sosialisasi melalui forum warga, komunikasi tatap muka, media massa, bahan sosialisasi, alat peraga sosialisasi, mobilisasi sosial, pemanfaatan budaya populer, pemanfaatan budaya lokal/tradisional, Laman KPU Nganjuk, papan pengumuman KPU Kabupaten Nganjuk, Media Sosial, Media Kreasi dan bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi Pemilu dengan baik.”<sup>13</sup>

Sosialisasi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan bermacam-macam metode. Hal ini dilakukan dengan alasan beranekaragam masyarakat Nganjuk tidak cukup memakai satu atau dua metode. Dengan banyak metode yang digunakan KPU dan tentunya sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 10 Tahun 2018 yang mengatur metode sosialisasi apa yang digunakan oleh KPU dalam sosialisasi. Selain metode sosialisasi, KPU juga menggunakan relawan demokrasi untuk membantu

---

<sup>12</sup> Dokumen Laporan Hasil Pemilu tahun 2019, 169

<sup>13</sup> Transkrip Wawancara 005/W/10-II/2022, 10.10

KPU dalam sosialisasi pemilu. Hal ini disampaikan Pak Muchiyin kepada peneliti

“Tugas-tugas relawan demokrasi itu selain membantu menginformasikan tentang kapan penyelenggaraan pemilu, hari apa kemudian selain itu tugasnya memberikan wawasan masyarakat dimasing-masing segmennya itu soal teknis bagaimana menggunakan suara yang benar karena terkadang sudah mempunyai suara pilihan tetapi cara menggunakan suara tidak benar maka suara tidak sah, maka hal ini dianggap penting. selain KPU menggunakan relawan Demokrasi, semua badan adhoc ppk di kecamatan, tps di desa-desa, dan kpps di tiap tps itu secara serentak mensosialisasikan pemilihan umum 2019, sehingga kalau dibandingkan dengan angka partisipasinya dari pemilu ke pemilu, pemilu 2019 itu partisipasinya di nganjuk paling tinggi dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya.<sup>14</sup>

Relawan demokrasi bertugas membantu KPU dalam menginformasikan tentang pemilu, kapan dilaksanakan serta memberi wawasan tentang bagaimana cara menggunakan hak pilih dengan benar. Proses sosialisasi dilakukan oleh KPU dan Relawan Demokrasi pada pemilu serentak 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya, pemilu serentak 2019 menggunakan 5 kotak suara. Banyaknya surat suara yang harus dipilih atau di coblos tentu membuat masyarakat bingung seperti yang dikatakan Pak Muchiyin

“Iya memang itu yang dirasakan. Ada partisipasi yang paling tinggi karena 5 kotak pemilihan secara berbarengan. Partisipasi tertinggi itu di pemilu presidennya, sedangkan di pemilu legislatif karena banyaknya calon legislatif itu relatif kurang tinggi dibanding dengan presiden. Lalu bagaimana caranya mensosialisasikan itu, KPU seperti yang sudah saya sampaikan tadi cara mensosialisasikan informasi yang ada di KPU tentang caleg itu di geber. Semuanya disampaikan melalui medsos yang pertama, yang kedua disampaikan melalui banner sosialisasi di tempat-tempat strategis ntah itu di pasar, warung, ntah itu di tempat strategis lainnya ntah kecamatan dan sebagainya itu.

---

<sup>14</sup>Transkrip Wawancara 002/W/08-II/2022, 10.06

Nah itu kita kasih pamflet-pamflet, kita bikin flyer -flyer, ini salah satu cara yang dilakukan KPU untuk mengenalkan para calegnya, mengenalkan peserta pemilu tahun 2019”<sup>15</sup>

Partisipasi tertinggi dari 5 kotak yang disediakan terdapat di pemilihan presiden sedangkan pemilihan legislatif relatif kurang tinggi. Hal ini KPU melakukan sosialisasi melalui semua media. Pertama melalui media sosial, kedua melalui banner yang dipasang ditempat strategis, ketiga pembagian pamflet dan fliyer tentang Pemilu 2019.



Sumber: Dokumen Laporan KPU

Gambar 2.10 Simulasi Pemungutan Suara Pada Disabilitas

Setiap warga negara mempunyai hak pilih untuk ikut serta dalam pesta demokrasi, pemilihan umum yang diadakan serentak pada tahun 2019 menjadi salah satu momen dimana masyarakat bisa ikut andil dalam proses pemilihan kekuasaan atau perwakilan rakyat untuk mewakili suara rakyat. Alasan Pemilu 2019 diadakan serentak sesuai aturan yang sudah disepakati,

<sup>15</sup> Transkrip Wawancara 002/W/08-II/2022, 10.22

seperti yang dikatakan Pak Nanang

“KPU sebagai penyelenggara yang sudah diamanahi Undang-undang. Sekarang acuan dari UU No. 7 tahun 2017 diatur bahwa pemilu dilaksanakan dengan cara serentak.”<sup>16</sup>

Badan penyelenggara pemilihan umum KPU merupakan lembaga independen yang diamanahi Undang-Undang. Aturan pemilu dilaksanakan dengan serentak sesuai dengan UU No. 17 tahun 2017. Pemilihan umum dilaksanakan secara serentak 5 kotak diadakan baru pada tahun 2019, seperti yang diucapkan Pak Nanang

“Iya serentak 5 kotak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2019. Sebelumnya pemilihan umum dimulai dari pemilihan DPD DPR RI, DPR kabupaten, DPR provinsi untuk 4 kotak dan kotak yang terakhir pemilihan presiden wakil presiden.”<sup>17</sup>

Penggunaan 5 kotak suara dalam menampung hak suara atau hak pilih masyarakat pada pemilu 2019 tentu membutuhkan sosialisasi yang matang, terutama pada pemilih pemula. Metode serta materi yang disiapkan tentunya lebih mendalam karena pemilih pemula sebagai permulaan warga negara tersebut menggunakan hak pilih. Program atau metode yang digunakan KPU dalam mensosialisasikan pemilu 2019 seperti yang dikatakan pak Muchiyin kepada peneliti

“InshaaAllah akan dipertahankan kegiatan yang pernah dilakukan ditahun 2019 untuk pemilih pemula dengan masuk ke sekolah-sekolah melakukan Kerjasama dengan pihak sekolah osis, OPK atau pramuka. Terkadang masuk ke sekolah-sekolah secara terjadwal itu, sekolah-sekolah mana yang mau diajak Kerjasama dengan KPU. Seperti ketika ada event sekolah upacara hari senin itu, KPU mendatangi di sekolah-sekolah untuk menyampaikan kegiatan ke pemilu. Selain itu, ke perguruan tinggi yang ada di nganjuk, masuk ke pondok pesantren yang notabene banyak pemilih pemula yang baru

<sup>16</sup>Transkrip Wawancara 003/W/08-II/2022, 09.45

<sup>17</sup> Transkrip Wawancara 003/W/08-II/2022, 09.42

menggunakan hak pilihnya.”<sup>18</sup>



Sumber: Dokumen Laporan KPU

Gambar 2.11 Sosialisasi melalui KPU Go To School

Sosialisasi KPU Kabupaten Nganjuk kepada basis pemula disesuaikan dengan basis atau segmen ini. Sosialisasi yang disampaikan lebih fokus kepada membangun pemahaman, kesadaran pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih tentang pentingnya peran mereka terhadap kegiatan demokrasi. Selain itu, Sosialisasi yang dilakukan KPU juga mengajarkan Pemilih Pemula tentang simulasi pemungutan suara agar ketika pemilu bisa menggunakan hak pilih dengan benar.

<sup>18</sup> Traskrip Wawancara 002/W/08-II/2022, 10.17



*Sumber: Dokumen Laporan Pemilu 2018*

Gambar 2.12 Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Pemilih Perempuan

Sosialisasi Pemilu yang dilakukan KPU dari berbagai segmen masyarakat bertujuan untuk merangkul dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu serentak 2019. Hal ini di buktikan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan KPU agar sosialisasi pemilu dapat berjalan sesuai proker yang ada. Strategi komunikasi dalam meningkatkan partisipasi bisa dianggap berhasil seperti yang dikatakan pak muchiyin

“Strategi komunikasi dalam meningkatkan partisipasi jika ukurannya dari hasil partisipasi maka saya menganggapnya berhasil karena ada peningkatan dari pemilu sebelumnya. Ukurannya siapa yang datang prosentase ada peningkatan dianggap berhasil. Tetapi jika dilihat dari perbandingan pemilu partisipasi tertinggi 55 maka itu tidak bisa dibandingkan.”<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Transkrip Wawancara 003/W/15-II/2022, 10.34



Partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 mengalami peningkatan dibanding dengan pemilu sebelumnya. Hal ini ditinjau dari prosentase kehadiran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Peningkatan partisipasi ini terbukti dari piagam penghargaan yang diterima oleh KPU seperti yang dikatakan pak Muchiyin

“KPU nganjuk itu dapatkan piagam penghargaan dari KPU provinsi. Bahasanya itu diadu dari kota/kabupaten se Jawa timur 38 kota/kabupaten partisipasi paling tinggi mana, ternyata nganjuk dapat penghargaan itu. Selain itu ya, partisipasi sosialisasi, menjelang coblosan kegiatan-kegiatan sosialisasi model lama yang dikira sangat membantu itu tetap dilakukan. Seperti membuat woro-woro seperti dulu kalau mau ada ludruk selalu ada woro-woro. Teman-teman penyelenggara juga melakukan itu, kemudian masuk ke warung-warung itu juga dilakukan oleh KPU, membuat warung demokrasi itu untuk memberi fasilitas semua elemen yang ada di masyarakat nganjuk untuk diajak berbincang soal demokrasi di Nganjuk.”<sup>20</sup>

Masyarakat dalam mengikuti sosialisasi yang diadakan KPU merasa antusias untuk ikut serta sosialisasi dan pendidikan pemilih tentang pemilihan umum untuk kalangan pemilih pemula, mereka cukup antusias dan membuat para pemilih pemula tertarik untuk turut andil dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan nanti.

### C. Faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi.

Tingkat partisipasi pemilihan umum di Kabupaten Nganjuk dalam Pemilu 2019 secara umum sudah berjalan dengan baik. Relawan KPU juga sudah melaksanakan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih yang sudah disusun sesuai dengan segmen atau basisnya. Peningkatan partisipasi di

---

<sup>20</sup> Transkrip Wawancara 002/W/08-II/2022, 10. 18

Kabupaten Nganjuk tidak lepas dari faktor yang ada melatar belakanginya seperti yang disampaikan Bapak Pujiono

“Faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi pemilu ada 4. Pertama, tentang kesadaran masyarakat terhadap pemilu dan pemilihan, kedua tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih, ketiga tentang peran peserta dalam pemilu dan yang terakhir tentang peran pemerintah daerah dan stakeholder. Empat faktor ini yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilu.”<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan dari narasumber pak pujiono, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Nganjuk diantaranya

1. Kesadaran masyarakat terhadap pemilu

Kesadaran terhadap pemilu adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis. Pengetahuan, kesadaran masyarakat menyangkut minat mereka terhadap dunia politik. Apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran terhadap pemilu tinggi, maka partisipasi pemilih akan meningkat. Begitupun sebaliknya, jika kesadaran terhadap pemilu rendah maka partisipasi pemilih secara otomatis rendah. Masyarakat yang mempunyai kesadaran pemilu rendah bisa dikategorikan masyarakat apatis.

2. Sosialisasi dan pendidikan pemilih

Sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi faktor penting yang berpengaruh dalam peningkatan partisipasi pemilih. Sosialisasi pemilu

---

<sup>21</sup> Transkrip Wawancara 005/W/10-II/2022, 14.20

yang dilakukan oleh KPU selain menginformasikan tentang pelaksanaan pemilu, Sosialisasi KPU mengadakan pendidikan pemilih kepada segmen masyarakat. Pendidikan pemilih tentang bagaimana cara menggunakan hak pilih dengan benar dan pentingnya menggunakan hak pilih pada pemilu.

### 3. Peran peserta dalam pemilu

Peran peserta dalam pemilu berpengaruh terhadap pelaksanaan sebelum maupun ketika pemilihan umum. Hal ini bisa dilihat ketika pelaksanaan pemilu, jika peserta tidak ikut berperan dan menggunakan hak pilihnya maka partisipasi peserta dalam kegiatan pemilu akan menurun. Selain itu peran peserta dalam pemilu menjadi faktor yang penting dan harus ada karena penggunaan hak pilih tidak bisa diwakilkan oleh orang lain.

### 4. Peran pemerintah dan stakeholder

Peningkatan partisipasi pemilih tentu tidak lepas dari peran pemerintah dan stakeholder. Peran pemerintah dalam peningkatan pemilih dalam suatu pemilu cukup besar, pemerintah dan stakeholder dalam meningkatkan partisipasi pemilih saling bekerjasama mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu. Masyarakat yang berada di kecamatan atau desa dengan adanya stakeholder membuat pemahaman akan pemilu akan lebih besar. Selain itu, dengan adanya stakeholder turut membantu masyarakat dalam proses pengenalan pemilu dan siapa saja yang akan dipilih.

Faktor-faktor diatas menjadi kesatuan yang mempengaruhi peningkatan partisipasi. Kesadaran masyarakat, sosialisasi dan pendidikan pemilih, peran peserta pemilu dan peran pemerintah dan stakeholder menjadi faktor yang saling berhubungan agar pelaksanaan dalam peningkatan partisipasi pemilih lebih maksimal. Hal ini berpengaruh terhadap jumlah *output* partisipasi pemilih dalam pemilu.

Pak Yudha selaku komisioner hukum dan pengawasan berkata

“Berarti siapa yang berkewajiban, Pertama dari KPU, peserta pemilu, pemilih, perguruan tinggi/sekolah, pemerintah dan stakeholder.”<sup>22</sup>

Hasil wawancara dari Pak Pujiono dan wawancara PakYudha divisi hukum dan pengawasan kepada peneliti mempunyai inti yang sama. Dalam peningkatan partisipasi, faktor-faktor diatas saling berhubungan sehingga menjadi kewajiban bersama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengguankan hak pilih ketika pemilu berlangsung.

#### D. Hambatan dalam peningkatan partisipasi masyarakat

Setiap kegiatan yang berjalan tentunya tak lepas dari hambatan yang membuat kegiatan tersebut kurang terlaksana sesuai harapan sehingga membuat hasil dari suatu kegiatan kurang maksimal. Dalam peningkatan partisipasi masyarakat tentu ada hambatan yang terjadi ketika proses peningkatan partisipasi seperti ketika sosialisasi, ketika hari pemilu ataupun ketika penghitungan.

---

<sup>22</sup>Transkrip Wawancara 004/W/08-II/2022



*Sumber: Dokumen Laporan Pemilu*

Gambar 2.13 Sosialisasi Basis Keluarga pada acara pengajian

Dalam kegiatan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nganjuk ada 11 segmen sasaran sosialisasi Pemilu, diantara 11 segmen tersebut ada beberapa segmen yang mengalami sedikit kendala. Diantaranya segmen keluarga Seperti yang diungkapkan Pak Pujiono

“Pada segmen keluarga ini, kan memang lebih luas kan, lebih variasi dibanding dengan segmen yang lain karena keluarga itu lebih kepada kelompok-kelompok keluarga. Nah dokumen yang dijadikan laporan itu banyak yang tercecer, biasanya kendalanya begitu. Tapi dari sisi pelaksanaan itu cukup masif. Intinya dari segmen keluarga kan dilakukan misal ke kelompok-kelompok perkumpulan warga dari rt rw dan seterusnya itu sudah dilakukan. Hanya kendala administrasi saja, karena menganggap informal kan buka pertemuan-pertemuan formal. Jadi ketika ada pertemuan warga kita akan hadir jadi seolah-olah secara administrasi itu terabaikan.”<sup>23</sup>

Kendala pada segmen keluarga dapat diatasi oleh KPU. Ketika

<sup>23</sup> Transkrip wawancara 010/W/15-III/2022

sosialisasi segmen keluarga ini mengalami kendala pada tercecernya dokumen laporan karena pada segmen keluarga yang terbagi atas kelompok-kelompok masyarakat. Kendala lainya pada segmen keluarga yakni kendala dalam administrasi, sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU seringkali diadakan secara informal dengan masuk ke kegiatan warga sehingga administrasi terabaikan. Selain kendala pada segmen keluarga, pak pujiono mengatakan kendala segmen lain pada peneliti

“Pedagang asongan karena dia kan kebutuhannya taktis ya dia butuh berdagang. Maka kita dengan cara menyebarkan lifflat, atau poster. Kita datangi mereka ditempat-tempat yang biasanya mereka tempati, maka komunikastinya terbatas. Karena itu kita memakai bahan untuk disosialisasikan dan masalah waktu.”<sup>24</sup>



Sumber: Dokumen Laporan Pemilu

Gambar 2.14 Sosialisasi Kepada Pedagang Asongan

Permasalahan pada waktu tidak bisa dengan mudah diselesaikan, KPU harus menyesuaikan waktu yang biasanya pedagang asongan luang. Pedagang asongan tentu lebih mementingkan pekerjaannya daripada menghadiri suatu pertemuan tentang sosialisasi. Berbeda dengan pelajar, hal

<sup>24</sup> Transkrip wawancara 010/W/15-III/2022

ini dikatakan perbedaan pada metode KPU mendatangi langsung dengan metode yang dikatakan oleh peneliti

“Kita mempunyai metode sesuai dengan background mereka. Maka kalau pelajar sifatnya adalah pendidikan, mahasiswa juga bersifat pendidikan. Kita juga bisa menggandeng guru pkn atau bagian kesiswaan begitu juga di mahasiswa, kita bisa menggandeng atau bekerjasama dengan perguruan tingginya atau dengan pengajar kewarganegaraan. Sedangkan pedagang asongan lebih mengutamakan bekerja, karena itu kita memakai bahan untuk disosialisasikan. Tapi kalau pedagang asongan. Maka kita akan mengejar pada saat mereka santai dan hanya sekilas saja. Maka kita dengan cara menyebarkan lifflat, atau poster. Kita datangi mereka ditempat-tempat yang biasanya mereka tempati, maka komunikasinya terbatas. Karena itu kita memakai bahan untuk disosialisasikan.”<sup>25</sup>

Perbedaan background pendidikan menjadi dasar perbedaan metode yang digunakan oleh KPU dalam sosialisasi. Pada segmen pelajar bersifat pendidikan, KPU bisa bekerjasama dengan guru kewarganegaraan atau dengan memberikan pendidikan pemilih kepada pelajar. Sedangkan pada pedagang asongan melalui bahan sosialisasi dengan mendatangi mereka ketika santai dengan memberikan lifflat atau poster karena komunikasi pada pedagang asongan terbatas. Pak pujiono menambahkan

“ Latar Belakang pemilih yang plural atau beranekaragam, metode sosialisasi yang digunakan harus menyesuaikan dengan latar belakang pemilih karena setiap pemilih memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dengan metode dan strategi yang berbeda pemilih bisa tahu, memiliki pengetahuan bisa bersikap dan hadir dalam pemilihan suara.”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Transkrip wawancara 010/W/15-III/2022

<sup>26</sup> Transkrip wawancara 010/W/15-III/2022

Pemilih yang beranekaram latar belakangnya membuat metode dan strategi yang digunakan KPU berbeda, menyesuaikan segmen pemilih yang KPU sosialisasi. Kendala berikutnya pada segmen warga internet, kendala pada segmen ini karena terbatasnya SDM yang mampu mengelola dan bertugas secara khusus untuk menangani media internet. Sehingga salah satu cara untuk mengatasi kendala ini dengan melakukan *share* berita/kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nganjuk, baik bersifat informatif maupun pengumuman.<sup>27</sup>

Pada segmen lain terdapat kendala yang dilalui oleh KPU dalam sosialisasi pemilu. Keterbatasan komunikasi karena dibutuhkan orang khusus yang bisa menerjemahkan pesan yang disampaikan oleh relawan KPU kepada segmen disabilitas. Hal ini dikatakan pak pujiono pada peneliti

“Kendalanya yaitu disabilitas itu tergantung kepada jenis disabilitasnya. Jadi kendalanya ketika relawan atau kita KPU mengumpulkan dalam satu waktu, dalam satu tempat ketika berbeda-beda disabilitas. Karena itu biasanya kita kerjasama dengan sekolah SLB. Kita bekerja sama dengan mereka juga kita bekerja sama dengan himpunan himpunan penyandang disabilitas. Sesuai dengan asosiasinya. Kendalanya lain kalau ada yang tidak memiliki perhimpunan atau tidak memiliki asosiasi dari jenis-jenis disabilitasnya. Itu saja kendalanya.”<sup>28</sup>

Keterbatasan ruang dan waktu menjadi kendala yang akan selalu ada dalam proses sosialisasi. Banyak jenis disabilitas yang ada membuat KPU mengalami kendala ketika mengumpulkan mereka dalam satu waktu. Adanya SLB dan himpunan disabilitas turut membantu KPU dalam

---

<sup>27</sup> Dokumen Laporan Pemilu 2019, 165

<sup>28</sup> Transkrip wawancara 010/W/15-III/2022



sosialisasi pemilu. Kendala lain jika orang penyandang disabilitas tidak masuk SLB atau tidak tergabung dalam himpunan.



Sumber: Dokumen Laporan KPU

Gambar 2.15 Pendidikan Pemilih Disabilitas

Hambatan atau kendala lain yang dialami KPU ketika Pemilu 2019 Seperti yang dikatakan oleh pak nanang divisi teknis dan penyelenggara pemilu

“Hambatan secara umum ditingkatan masyarakat perdesaan terkait dengan faktor kegiatan rutinitas mencari nafkah, jadi meskipun hari pemilihan diliburkan secara nasional namun itu bagi masyarakat yang ASN maupun yang non ASN seperti yang di pabrik. Tapi untuk masyarakat di perdesaan kan tidak ada hari libur nasional tidak termasuk kategori itu. Semisal berdagang kan tidak ada hari libur nasional kemudian bertani juga tidak ada, jika waktunya ke sawah ya bakal ke sawah jadi tidak ada hari libur nasional. Sehingga masyarakat ada yang sebagian kecil memprioritaskan untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kehidupannya itu. Saya rasa itu saja yang menjadi salah satu faktor mereka tidak hadir untuk berpartisipasi dalam pemilihan maupun pemilu itu.”<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Transkrip Wawancara 008/W/15-II/2022 10.12

Berdasarkan hambatan diatas KPU berusaha memberi sosialisasi kembali akan pentingnya pemilu. Komunikasi antara KPU dengan masyarakat harus terjalin dengan baik, agar nanti ketika pelaksanaan bisa berjalan beriringan dan tidak terjadi *miss* komunikasi. Kejadian tersebut terjadi karena antara komunikator dengan komunikan kurang memahami akan pesan yang disampaikan. Oleh karena itu solusi dari hambatan tersebut pak nanang menambahkan.

“kita sosialisasikan kepada tokoh masyarakat atau stakeholder masyarakat di desa atau di kampung tersebut tentang pentingnya pemilu itu apa. Karena apabila masyarakat tidak tau, tentunya masyarakat memaknai pemilu hanya memilih atau mencoblos kertas itu saja. Tapi semisal mereka mengetahui makna pemilu secara utuh, mereka akan tau manfaat kedepannya seperti apa. Pemilu kan peralihan kekuasaan yang dampaknya nanti terhadap kebijakan-kebijakan yang pro-poor atau pro kepada masyarakat yang kecil, misalnya masyarakat bertani, berarti kebijakan yang pro kepada pertanian, kemudian masyarakat yang berdagang berarti kebijakan yang pro kepada pedagang. Kalau tidak mengetahui manfaat dari pemilu, saya rasa mereka akan seperti itu, jadi solusinya kita akan sosialisasi secara masif di tingkatan stakeholder kampung itu”<sup>30</sup>

Sosialisasi pentingnya pemilu KPU menyampaikan sosialisasi kepada tokoh masyarakat atau stakeholder di desa tentang pentingnya pemilu. Pemilu sebagai Kegiatan peralihan kekuasaan yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus turut berpartisipasi dalam pemilihan umum agar mengetahui mana calon yang pantas dan layak untuk dipilih atau mana yang kurang pantas dipilih. Kendala lain disampaikan oleh stakeholder, seperti yang disampaikan wahyu petugas KPPS.

---

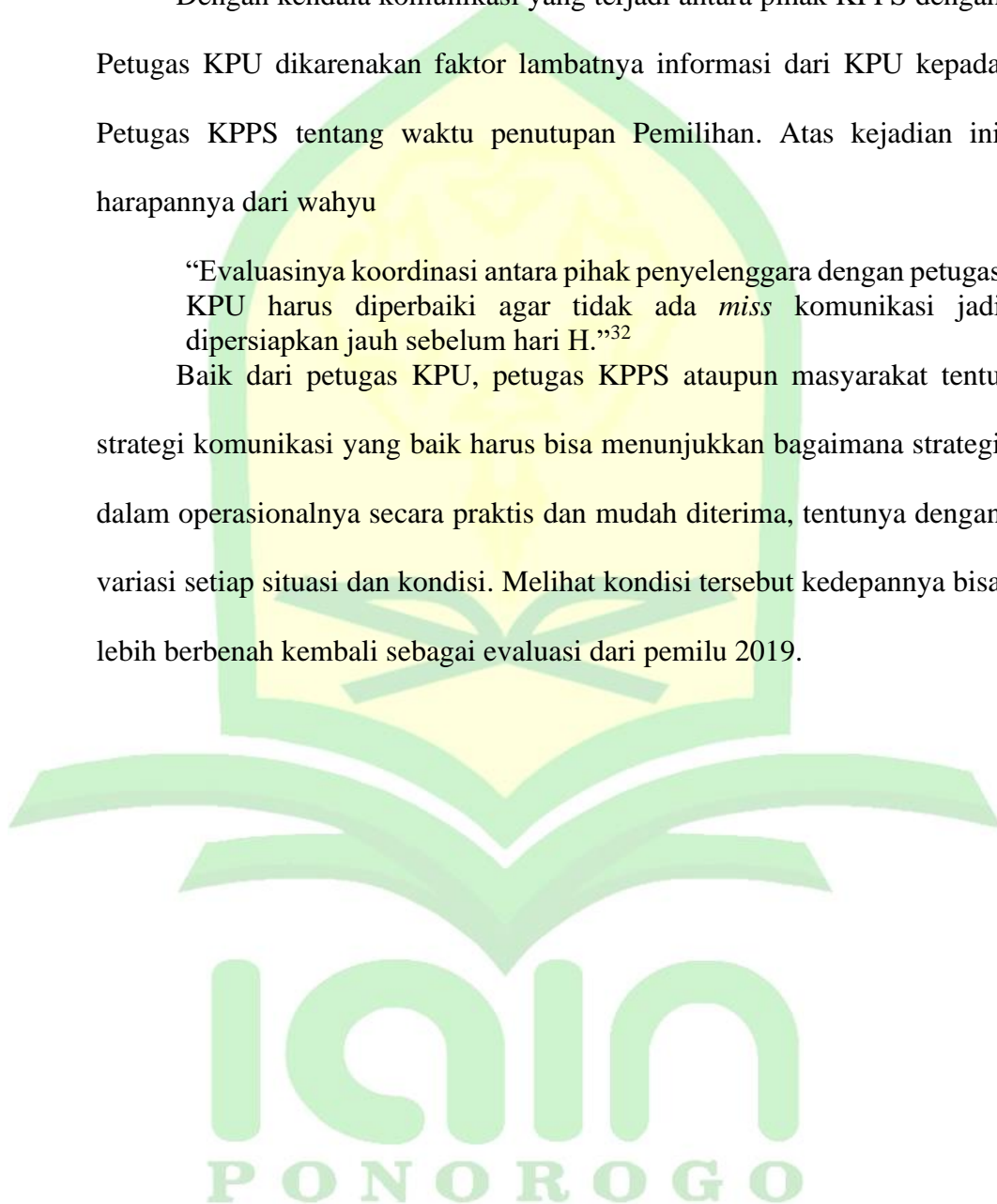
<sup>30</sup> Transkrip wawancara 008/W/15-II/2022 10. 18

“Kendalanya dari komunikasi antara pihak kpps dengan KPU Pusat tentang penutupan pemilihan molor sehingga penghitungan suara tidak selesai sesuai jadwal.”<sup>31</sup>

Dengan kendala komunikasi yang terjadi antara pihak KPPS dengan Petugas KPU dikarenakan faktor lambatnya informasi dari KPU kepada Petugas KPPS tentang waktu penutupan Pemilihan. Atas kejadian ini harapannya dari wahyu

“Evaluasinya koordinasi antara pihak penyelenggara dengan petugas KPU harus diperbaiki agar tidak ada *miss* komunikasi jadi dipersiapkan jauh sebelum hari H.”<sup>32</sup>

Baik dari petugas KPU, petugas KPPS ataupun masyarakat tentu strategi komunikasi yang baik harus bisa menunjukkan bagaimana strategi dalam operasionalnya secara praktis dan mudah diterima, tentunya dengan variasi setiap situasi dan kondisi. Melihat kondisi tersebut kedepannya bisa lebih berbenah kembali sebagai evaluasi dari pemilu 2019.



---

<sup>31</sup> Transkrip Wawancara 009/W/21-II/2022 22.15

<sup>32</sup> Transkrip Wawancara 009/W/21-II/2022 22.25

**BAB IV**

**ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI KPU UNTUK  
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DALAM  
MENGUNAKAN HAK PILIH 2019 DI KABUPATEN NGANJUK**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk merupakan badan independen penyelenggara pemilihan umum berdasar Undang-undang yang berada di Kabupaten Nganjuk tepatnya di sebelah selatan smn 3 Nganjuk. Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih dengan benar. Sosialisasi dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan yang akan datang sangat dibutuhkan, agar masyarakat lebih memahami pentingnya menggunakan hak pilih. Ketika masyarakat memahami, tentu bukan tidak mungkin daya partisipasi masyarakat akan meningkat.

1. Strategi komunikasi kpu kepada masyarakat

Bentuk strategi yang dilakukan oleh KPU sesuai teori peneliti menurut Newman, strategi penguatan dengan melihat citra kontestan dan kinerja selama mengemban jabatan di politik, strategi rasionalis pemilih melihat citra yang telah dibangun disukai oleh pemilih walaupun faktanya tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini bisa ditunjukkan melalui media KPU sebagai informasi kepada masyarakat. Strategi berikutnya dengan strategi bujukan, strategi yang

dilakukan dengan program jalan sehat, dialog langsung kepada para pemilih, strategi yang terakhir dengan strategi konfrontasi, KPU memberikan sosialisasi cara memilih dan kerugian apabila tidak menggunakan hak pilih.<sup>1</sup>

Strategi komunikasi yang diterapkan KPU kepada masyarakat pada pemilihan serentak 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 10 tahun 2018, ada 5 strategi yang diterapkan seperti, pertama tatap muka atau ceramah, kedua melalui media massa cetak maupun elektronik, ketiga menggunakan alat dan bahan sosialisasi, keempat dengan menggunakan media kreasi mural dan yang kelima dengan menggunakan relawan demokrasi.

Strategi komunikasi KPU pertama dengan tatap muka seperti melakukan rapat koordinasi, sosialisasi dan pendidikan pemilih, diskusi, seminar, lokakarya (*workshop*), rapat kerja, pelatihan, ceramah, simulasi, gelar wicara (*talk show*) dan/atau metode tatap muka lainnya.

Strategi komunikasi kedua dengan Media massa, baik dengan media konvensional ataupun cetak seperti koran atau media elektronik seperti radio, televisi dan media online seperti laman KPU, Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube dianggap mampu untuk mengajak serta mengingatkan masyarakat tentang Pemilu serentak 2019. Media massa ini seiring perkembangan zaman, digunakan secara maksimal

---

<sup>1</sup> Andrianus Pito, *Mengenal Teori-teori Politik*, (Bandung: Nuansa, 2006) 211

oleh KPU untuk sosialisasi pemilu serentak 2019. Penggunaan media massa yang terus merambat diberbagai kalangan dianggap mampu untuk digunakan dalam sosialisasi KPU. Media konvensional, elektronik dan media online oleh KPU dimanfaatkan secara maksimal dalam sosialisasi Pemilu serentak 2019.

Strategi komunikasi ketiga KPU yakni dengan bahan dan alat peraga sosialisasi, dimana alat peraga seperti brosur, poster, stiker, spanduk, baliho, umbul-umbul, dan *billboard/videotron* dianggap mampu menunjang sosialisasi yang dilakukan oleh KPU.

Strategi komunikasi keempat dengan menggunakan Media Kreasi Mural. Media Kreasi Mural sampai saat ini masih dianggap strategi yang cukup menarik bagi berbagai kalangan. Ketika KPU sosialisasi dengan media sosial, pamflet, banner ataupun media elektronik seperti TV dan radio. Media mural ini dianggap mampu membuat daya tarik tersendiri, media mural yang dikemas dalam bentuk Lomba Mural Pemilu Serentak tingkat SMA/SMK/ Sederajat tersebar di 20 kecamatan se-kabupaten Nganjuk. Tema yang diambil beragam, mulai dari ajakan memerangi hoax pemilu, anti golput, anti politik uang dan anti politik SARA, serta tema ajakan untuk memilih di tps pada tanggal 17 april 2019. Melalui media kreasi ini harapannya bisa mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu serentak 2019.

Strategi komunikasi berikutnya kelima dengan menggunakan

Relawan Demokrasi. Relawan demokrasi menjadi salah satu strategi komunikasi KPU kepada masyarakat diyakini sangat bermanfaat karena relawan demokrasi terbagi atas 11 segmen atau basis pemilih untuk membantu KPU dalam sosialisasi dan Pendidikan pemilih. Ada basis keluarga, pemula, muda, perempuan, penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, warga internet, dan relawan demokrasi. Sesuai dengan paparan data peneliti pada bab III, berbagai relawan demokrasi yaitu:

a. Segmen keluarga

Segmen pemilih berdasarkan berbagai jenis pemilih yang ada di masyarakat. Segmen keluarga adalah keluarga yang mengikuti pengajian rutin yang didalam kegiatan pengajian juga disampaikan tentang program pemilihan, informasi paslon serta ajakan dalam memberikan hak pilih, dan tata cara memilih juga diajarkan. Selain masuk ke kegiatan pengajian, Petugas KPU yang bernama PPDB mengunjungi rumah masyarakat untuk pemutakhiran data pemilih juga menyampaikan sosialisasi melalui fliyer kepada masyarakat yang berbasis keluarga dengan masuk ke keluarga. Dengan tatap muka langsung, sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilu 2019 bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan.

b. Segmen pemilih pemula

Sosialisasi yang disampaikan KPU lebih fokus kepada

membangun pemahaman, kesediaan pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih tentang pentingnya peran mereka terhadap kegiatan demokrasi. Selain itu, Sosialisasi yang dilakukan KPU juga mengajarkan Pemilih Pemula tentang simulasi pemungutan suara agar ketika pemilu bisa menggunakan hak pilih dengan benar.

Berbagai upaya sosialisasi yang dilakukan KPU basis pemula meliputi pelajar SMA/SMK/MA yang baru memasuki usia 17 tahun dengan pemahaman yang minim mengenai pemilihan umum. Kegiatan sosialisasi KPU *go to school* dilakukan tatap muka dengan kerjasama pihak sekolah seperti osis, OPK atau pramuka kemudian menyampaikan kegiatan kepemiluan ketika even sekolah atau ketika upacara hari senin. Sosialisasi KPU juga masuk ke perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Nganjuk serta pondok pesantren yang banyak memiliki pemilih pemula yang baru menggunakan hak pilihnya. Selain itu, Sosialisasi KPU pemilih pemula mengadakan kegiatan lain diluar sekolah seperti Nganjuk *Car Free Night* (NCFN) tujuan diadakan kegiatan ini dengan harapan bisa mengajak pemilih pemula tertarik untuk ikut meramaikan pemilu 2019.

c. Basis pemilih muda

Sosialisai yang dilakukan KPU Kabupaten Nganjuk dengan memberikan informasi tentang pemilu serentak 2019 melalui



kegiatan *car free day* yang diadakan hari minggu dengan pembagian pamflet seputar pemilu serta tata cara menggunakan hak pilih dengan benar. Pada basis atau segmen pemilih muda selain melalui *car free day*, KPU Kabupaten Nganjuk mengadakan konser atau tontonan yang menarik bagi pemilih muda. Kegiatan pada pemilih muda hampir sama dengan pemilih pemula *car free night*, tujuan utama tentunya mengajak pemilih untuk tertarik meramaikan pemilu serentak 2019.

d. Basis Perempuan

Sosialisasi KPU Kabupaten Nganjuk pada basis perempuan dengan mengadakan pertemuan antara KPU dengan pemilih perempuan. Sosialisasi yang dilakukan KPU dengan memberikan Pendidikan pemilih tentang informasi tata cara pemilu atau menggunakan hak pilih dengan benar, mengenalkan paslon yang ada dan pentingnya hak pilih dalam suatu demokrasi.

e. Basis Penyandang Disabilitas

Sosialisasi KPU Kabupaten Nganjuk kepada basis penyandang disabilitas selain memberikan informasi terkait pemilu, KPU juga memberikan motivasi tentang pentingnya hak pilih yang mereka punya. Dengan pendidikan pemilih basis disabilitas nantinya bisa memahami bagaimana ketika pemilihan berlangsung, tentunya tetap diberikan perlakuan khusus. Hal ini sosialisasi pentingnya hak pilih dan motivasi, KPU Kabupaten

Nganjuk melakukan simulasi pemungutan suara.

f. Basis Berkebutuhan Khusus

Basis atau segmen pemilih berkebutuhan khusus, sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Nganjuk dengan memberikan pendidikan pemilih. Pemilihan berkebutuhan khusus yang mempunyai kendala seperti belum bisa membaca akan dibimbing melalui pendidikan pemilih dengan melakukan simulasi pemilu. Simulasi pemilu yang diadakan KPU Kabupaten Nganjuk menggunakan contoh 5 surat suara dengan warna yang berbeda di tiap surat suara. Hal ini menjadi salah satu langkah KPU dalam sosialisasi untuk segmen pemilih berkebutuhan khusus dan tetap memperhatikan hak-hak pemilih dalam menggunakan suaranya.

g. Basis kaum marginal

KPU Kabupaten Nganjuk melakukan sosialisasi kepada kaum marginal yang berada di Jembatan Lama-Kertosono. KPU Kabupaten Nganjuk melakukan kunjungan ke warung remang-remang yang masih buka dengan mensosialisasikan mengenai pelaksanaan pemilu serta memberikan penjelasan terkait 5 surat suara yang akan digunakan pada pemilu serentak. 5 jenis surat suara mempunyai warna yang berbeda-beda, seperti surat suara presiden dan wakil presiden berwarna abu-abu, surat suara DPR RI berwarna kuning, surat suara DPD berwarna merah, surat suara DPRD provinsi berwarna biru dan surat suara DPRD

kabupaten berwarna hijau. Harapan dari penjelasan warna surat pemilu nantinya kaum marjinal bisa mengerti dan tau siapa yang akan dipilih.<sup>2</sup>

h. Basis komunitas

Sosialisasi pemilu pada basis komunitas dengan mengadakan Kopdar gabungan otomotif di Nganjuk yang dilanjutkan penandatanganan deklarasi siap sukseskan pemilu 2019 serta liwetan sebagai bentuk kebersamaan seduluran sesama komunitas. Pelaksanaan sosialisasi ini harapannya bisa mengajak banyak komunitas yang ada di Nganjuk untuk berkumpul dan meramaikan pemilu 2019. Metode ini dianggap cukup efektif mengajak masyarakat khususnya yang tergabung dalam komunitas otomotif untuk hadir dan mengikuti jalannya acara yang diselenggarakan KPU. Selain komunitas otomotif tentu masyarakat umum turut hadir dalam kegiatan ini, sehingga metode ini akan digunakan pada pemilu yang akan mendatang.

i. Basis Keagamaan

Sosialisasi KPU Kabupaten Nganjuk basis keagamaan tentang tahapan jadwal, informasi paslon, pentingnya hak pilih, tata cara memilih dengan benar disertai alat peraga pemilu yang telah dibawa agar pada pemilu 2019 bisa menggunakan hak pilih dengan bijak. Sosialisasi menggunakan metode tatap muka

---

<sup>2</sup> [www.kpud-nganjukkab.go.id](http://www.kpud-nganjukkab.go.id) (diakses tanggal 25 februari 2022, pukul 16.05)

langsung dengan menghadiri Pengajian yasinan rutin warga.

Relawan demokrasi digunakan oleh KPU setiap kali sosialisasi bertujuan untuk merangkul dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu serentak 2019. Hal ini dibuktikan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan KPU agar sosialisasi dapat berjalan sesuai proker yang sudah di persiapkan.

Berbagai strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU belum membuat masyarakat mengerti akan pentingnya menggunakan hak pilih dan konsekuensi jika tidak menggunakan hak pilihnya. Masyarakat masih banyak yang kurang mengenal siapa calon yang akan dipilih karena minimnya informasi yang diberikan kepada masyarakat. Pengenalan calon bukan hanya tugas KPU sendiri tetapi tugas peserta pemilihan agar mengenalkan diri kepada masyarakat bahwa mereka ada dan layak untuk dipilih. Dengan adanya upaya pengenalan diri tersebut, masyarakat bisa mengetahui dan mengenal siapa saja calon yang akan dipilih.

## 2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih

Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih terkadang mengalami kenaikan dan penurunan. Peneliti sudah memaparkan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam kerangka teori berdasarkan ungkapan dari Myron Weiner dan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik berdasarkan artikel yang sudah peneliti analisis.

Perubahan dan reformasi politik yang terus ada dan dengan visi misi yang visioner membuat masyarakat sangat antusias sehingga menyentuh hati masyarakat untuk tergerak menggunakan suaranya. Selain itu kegiatan kampanye juga berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat serta citra paslon baik berdasarkan citra sosial, citra kandidat, citra kandidat religion dan aspiratif, dan peristiwa individunya dengan rekam jejak yang baik selama berorganisasi dan berkariyer, berpengaruh terhadap partisipasi politik pemuda atau masyarakat.

Menganalisis faktor yang mempengaruhi partisipasi memilih berdasarkan ungkapan dari Ketua KPU Pujiono ada 4 faktor, seperti pertama kesadaran masyarakat terhadap pemilu dan pemilihan, Kesadaran masyarakat terhadap pemilu dan pemilihan dari tahun ke tahun mengalami penurunan meskipun tingkat partisipasi meningkat. Hal ini terjadi dikarenakan tingkat kecerdasan masyarakat meningkat sehingga lebih mampu memilah visi misi kandidat dalam pemilu yang terpercaya atau sekedar kata.

Kedua faktor sosialisasi dan pendidikan pemilih, Sosialisasi dan pendidikan pemilih sangat besar pengaruhnya, ketika sosialisasi berlangsung masyarakat bisa lebih mengetahui dan lebih mengenal siapa yang akan dipilih, selain itu pendidikan pemilih juga penting agar masyarakat mengerti bagaimana tata cara yang benar dalam menggunakan hak pilihnya sehingga ketika pemilu masyarakat bisa

menggunakan hak pilih dengan bijak.

Ketiga faktor peran peserta pemilu, Peran peserta pemilu juga turut menjadi faktor dalam meningkatkan partisipasi. Peserta pemilu jika kooperatif dengan KPU maka tidak akan ada *miss* antar KPU dengan peserta pemilu dalam pelaksanaan pra sampai dengan pemilu. Keempat faktor peran pemerintah daerah dan stakeholder, peran pemerintah dan stakeholder turut menjadi faktor dalam peningkatan partisipasi pemilih. Faktor diatas menjadi kesatuan yang sulit dipisahkan dalam peningkatan partisipasi pemilih dalam politik.

Faktor lainnya yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilu yakni faktor interaksi dakwah. Keberagaman agama yang ada di Indonesia membuat politik di negeri ini berbeda dengan negara lainnya. Pemuka agama dari islam atau biasa disebut ustadz mengajak jamaahnya menggunakan hak pilih yang ada hubungan baik dengan mereka, kemudian pemuka agama kristen ataupun hindu tetap menyampaikan kepentingan beragama tanpa politik tetapi kepengurusan hindu pada pura menyampaikan ajakan untuk berpartisipasi dalam pemilih.

### 3. Hambatan komunikasi dalam peningkatan partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan koordinasi komunikasi yang efektif tentunya mengalami hambatan-hambatan yang terjadi ketika proses pelaksanaan komunikasi di lapangan. Seperti teori yang peneliti ulas pada bab sebelumnya tentang hambatan komunikasi berdasarkan

pendapat Ludhow dan Panton, hambatan atau kendala dalam berkomunikasi akan selalu ada. Distorsi atau hambatan akan terjadi ketika jalannya proses komunikasi.

Hambatan dalam peningkatan partisipasi masyarakat berdasarkan ungkapan dari Ketua KPU Pak Pujiono kendala administrasi pada segmen keluarga. Sosialisasi pada segmen keluarga, KPU ikut dalam suatu kegiatan rutin yang diadakan masyarakat sehingga bersifat informal. Hal ini menjadi alasan mengapa terjadi kendala administrasi.

Kendala lain yang dirasakan KPU Pak Pujiono mengatakan keterbatasan waktu ketika sosialisasi pada pedagang asongan. Mereka tentunya mengutamakan bekerja dibandingkan dengan ikut hadir dalam suatu pertemuan pemilu, dengan alasan demikian KPU terjun langsung ke tempat mereka mencari nafkah dan memberi sosialisasi terbatas dengan memberi pamflet atau brosur pemilu ketika mereka sedang ada waktu luang.

Sosialisasi kepada pedagang asongan dan pelajar tentu metode yang digunakan berbeda karena melihat background pendidikan berbeda. Hal ini sesuai dengan teori yang peneliti paparkan pada bab sebelumnya tentang perbedaan latar belakang atau *cultural differens*. Distorsi atau hambatan lain yang dialami KPU ketika sosialisasi ketika sosialisasi segmen disabilitas dimana mengumpulkan penyandang disabilitas dalam satu waktu tetapi penyandang

disabilitas tersebut tidak tergabung dalam suatu himpunan atau SLB.

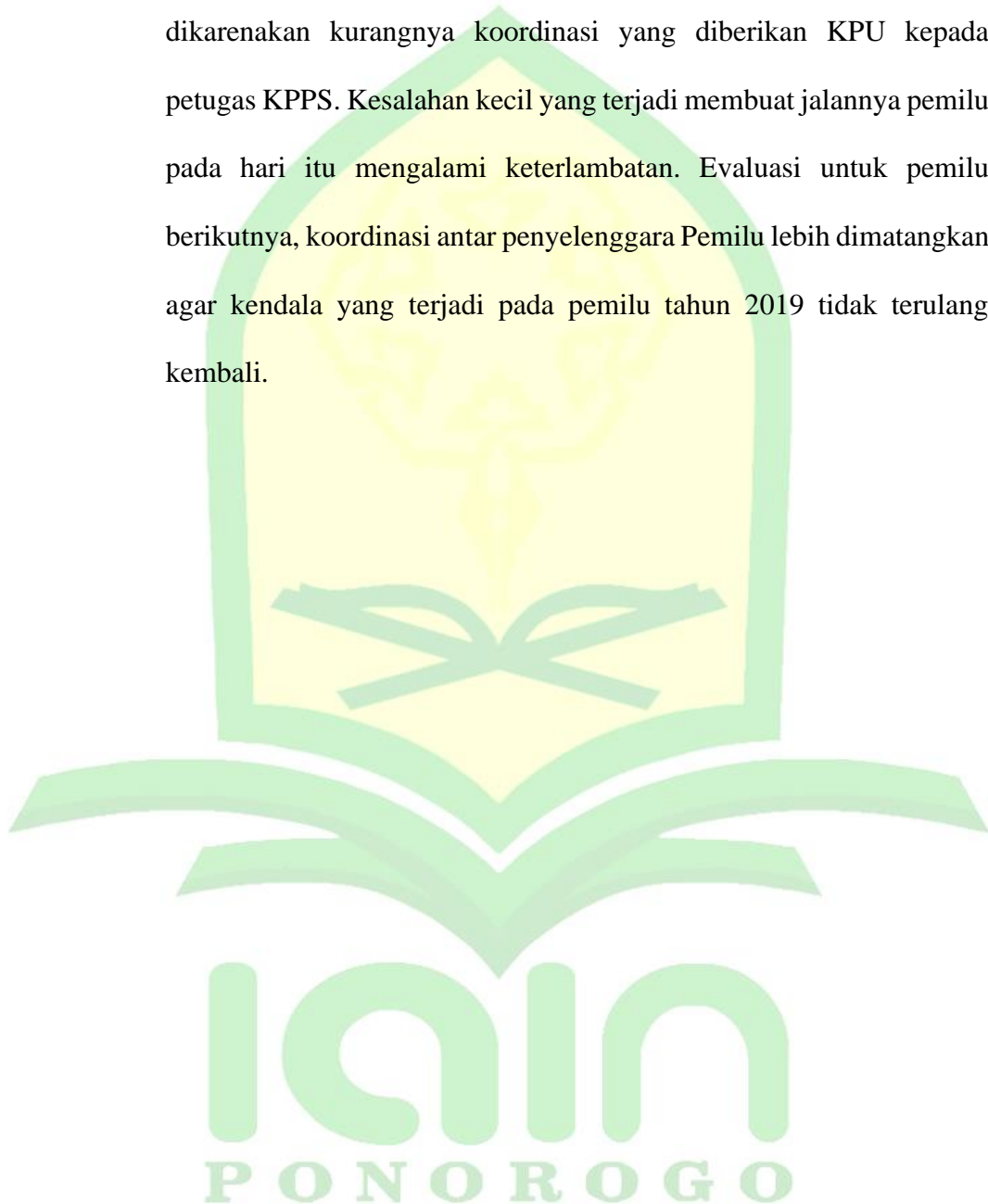
Berdasarkan pada dokumen laporan pemilu terdapat hambatan yang terjadi pada segmen warga internet, tentang kurangnya SDM yang mampu dalam mengoperasikan media sosial. Keterbatasan jumlah SDM yang menguasai secara khusus media internet, membuat proses sosialisasi pemilu melalui segmen warga internet kurang maksimal. KPU melakukan langkah dengan metode *share* berita/kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nganjuk, baik bersifat informatif maupun pengumuman.

Hambatan lainnya seperti yang diungkapkan pak nanang, tentang adanya kurang tepatnya pemilihan hari dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga Penyelenggaraan pemilu seringkali diadakan pada hari masuk, dengan tujuan masyarakat ASN dan non ASN bisa mengikuti pemilu karena sudah di jadwalkan menjadi hari libur nasional. meskipun Faktanya masih terdapat masyarakat non ASN yang lebih mementingkan pekerjaannya dibanding dengan menggunakan hak pilihnya. Hal ini menjadi tugas KPU sebagai penyelenggara dalam sosialisasi memberikan pemahaman tentang pentingnya hak pilih dalam pemilu.

Komunikasi sangatlah penting dalam segala proses kegiatan yang ada di masyarakat. Ketika penyampaian pesan komunikasi tidak tersampaikan dengan baik, maka bukan tidak mungkin komunikasi mengalami *miss communication* atau biasa disebut kesalahan dalam



penangkapan pesan komunikasi. seperti halnya yang diungkapkan wahyu, tentang penutupan pemilihan molor sehingga penghitungan suara tidak selesai sesuai jadwal. Keterlambatan yang terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi yang diberikan KPU kepada petugas KPPS. Kesalahan kecil yang terjadi membuat jalannya pemilu pada hari itu mengalami keterlambatan. Evaluasi untuk pemilu berikutnya, koordinasi antar penyelenggara Pemilu lebih dimatangkan agar kendala yang terjadi pada pemilu tahun 2019 tidak terulang kembali.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum 2019 Di Kabupaten Nganjuk” beberapa kesimpulan mengenai strategi komunikasi yang digunakan KPU Kabupaten Nganjuk.

1. Strategi Komunikasi KPU yang digunakan ada lima strategi yang diterapkan, pertama tatap muka, kedua melalui media massa cetak maupun elektronik, ketiga menggunakan alat dan bahan sosialisasi, keempat dengan menggunakan media kreasi mural dan yang kelima dengan menggunakan relawan demokrasi.
2. Ada empat faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi, pertama tentang kesadaran masyarakat terhadap Pemilu dan Pemilihan, kedua Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, ketiga Peran Peserta Pemilu, keempat Peran pemerintah daerah dan stakeholder.
3. Hambatan peningkatan partisipasi masyarakat, pertama hambatan administrasi pada segmen keluarga, kedua kendala waktu ketika sosialisasi pada segmen asongan dan yang ketiga

kurangnya SDM yang mampu dalam mengoperasikan media sosial. Keempat kurang tepatnya pemilihan hari dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga Penyelenggaraan pemilu seringkali diadakan pada hari masuk, meskipun Faktanya masih terdapat masyarakat non ASN yang lebih mementingkan pekerjaannya dibanding dengan menggunakan hak pilihnya. Hambatan terakhir kurangnya koordinasi Petugas KPU kepada petugas KPPS. Kesalahan kecil dalam penyampaian pesan komunikasi membuat jalannya pemilu pada hari itu mengalami keterlambatan.

#### **B. Saran**

1. Penulis berharap strategi yang digunakan KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat bisa berjalan dengan maksimal. Penelitian lebih lanjut penting dilakukan sebagai usaha memperluas pengetahuan tentang ilmu komunikasi dan strategi komunikasi yang dipakai KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Saran penulis faktor peningkatan partisipasi pemilih bisa saling berkolaborasi agar peningkatan partisipasi bisa maksimal.
3. Hambatan pada pemilu 2019, penulis berharap KPU bisa mengevaluasi menjadi lebih baik dan hambatan yang terjadi tidak terulang pada pemilu berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009)
- Antomo, Budi. dkk, “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018” *Jurnal Aspirasi*, 2, (Agustus, 2021)
- Bachri. Bachtiar S. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Teknologi Pendidikan, Vol.10 No. 1, April 2010.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2012)
- Dewi, Sutrisna. *Komunikasi Bisnis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007)
- Effendy, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992)
- , *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Effendy, Onong Uchajana. *Dinamika Komunikasi*, (bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004)
- , *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. (cet. XX, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007)
- , *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. (cet. 1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004)
- Faulks, Keith. *Sosiologi politik* (bandung: Penerbit Nusa Media,2012)
- Ghonny, Djunaidi. dan Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Ar Ruzz Media. 2012.

- Halim, Rahmawati dan Muhalin Lalongan, *Partisipasi Politik Masyarakat Teori dan Praktik* (Makassar: CV. Sah Media, 2016)
- Harivarman, Dwi. *Jurnal Hambatan Komunikasi Internal di Organisasi Pemerintahan, FISIP Unair*, Surabaya
- Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2015)
- Jailani, M Syahrani. *Ragam Penelitian Qualitative*, (Edu-Bio, (4), 42-43, 2013)
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2018)
- Leksono, Sugeng Puji. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016)
- MD, Moh. Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999)
- Mudjiono, Yoyon. *Ilmu Komunikasi*(Surabaya: Jaudar Press,2015)
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013)
- P, M. Choirullah. dkk. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019*. POLITEA : Jurnal Politik Islam, Vol. 3 No. 2, 2020
- Pito, Toni Andrianus. *Mengenal Teori-teori Politik*, (Bandung: Nuansa, 2006)
- dkk. *Teori-teori politik: Dari Sistem Politik sampai Korupsi*(bandung: Penerbit NUANSA MEDIA, 2013)
- Rahman, Arifin. *Sistem Politik Indonesia Dalam Prespektif Struktural Fungsional*, (Surabaya: SIC, 2002)

- Rakhmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004)
- Roudhonah, *Ilmu Komunikasi*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019)
- Situmorang, Syafizal Helmi. *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, (Medan: USU Press, 2010)
- Sodikin, *hukum Pemilu, Pemilu sebagai Praktik Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publising, 2014)
- Subakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*
- Tim Redaksi BIO, *Undang-undang Pemilu 2019 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018)
- 

